



PGRI Ciamis Sabet Juara 1 Paduan Suara Puspa Swara Wanoja Sunda Tingkat Jabar

Ciamis, Jaya Pos

Harmoni suara khas Sunda mengemah megah di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, saat nama PGRI Kabupaten Ciamis diumumkan sebagai Juara 1 Paduan Suara "Puspa Swara Wanoja Sunda" tingkat Jawa Barat (Jabar) Tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih di hadapan para finalis terbaik dan disaksikan langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulya-



Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis didampingi Ketua PGRI menerima penghargaan Juara 1 Paduan Suara tingkat Jabar. (Foto:Mamay)

▶▶ Halaman 5

25 KUA Terima Laptop dan Printer di Pandeglang Diduga Disertai Pungutan

Pandeglang, Jaya Pos

Sebanyak 25 Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pandeglang, Banten, menerima bantuan perangkat berupa laptop dan printer dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang. Namun, penyaluran bantuan tersebut diduga disertai permintaan sejumlah uang yang disebut sebagai pungutan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total

▶▶ Halaman 5



9 WNI Misi Global Sumud Flotilla Dipulangkan RI KECAM DUGAAN PENYIKSAAN OLEH ISRAEL



Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono bersama 9 WNI relawan Flotilla. (foto ist)

“ Sembilan WNI relawan misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 mulai dipulangkan usai ditahan Israel. Pemerintah RI mengecam dugaan kekerasan yang dialami para relawan selama penahanan. “

Jakarta, Jaya Pos

Pemerintah Indonesia memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 mulai dipulangkan ke Tanah Air usai sempat ditahan aparat Israel. Saat ini, para relawan tersebut telah meninggalkan wilayah Israel dan transit di Istanbul, Turki, sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan pemerintah terus mengawal proses pemulangan seluruh WNI hingga tiba dengan selamat di daerah masing-masing.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” ujar Sugiono dalam pernyataan virtual, Kamis

▶▶ Halaman 5

Bupati Tangerang Sidak Tempat Hiburan Malam Ilegal dan Panggil Pengelola

Tangerang, Jaya Pos

Bupati Tangerang Moch Maesyul Rasyid bersama Kapolesta Tangerang dan Dandim 0510 Tigaraksa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tempat hiburan malam yang diduga tidak memiliki izin operasional.

Dalam rangkaian sidak tersebut, bupati turut memanggil pengelola usaha dan menggelar musyawarah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satpol PP, Camat Tigaraksa dan Lurah Kadu Agung serta perwakilan warga setempat berlangsung di kantor Kelurahan Kadu Agung Tigaraksa, Rabu (13/5/26).

Bupati Maesyul Rasyid mengatakan, Pemkab Tangerang telah meminta klarifikasi langsung kepada pemilik usaha hiburan malam terkait aktivitas yang meresahkan masyarakat tersebut. Musyawarah bertujuan agar situasi tetap aman



Bupati Tangerang Moch Maesyul Rasyid (kiri) bersama Satpol PP dan Forkopimda saat sidak. (Foto: ist)

dan kondusif.

“Kita melaksanakan musyawarah dengan Forkopimda, Camat, Lurah, perwakilan RT/RW, juga pemilik usaha hiburan. Jadi sudah kita sampaikan terhadap situasi kondisi di wilayah sekitar Puspemkab Tangerang, harus betul-betul aman, kondusif,” ujar Bupati

Maesyul.

Maesyul lebih lanjut mengemukakan, para pengelola tempat hiburan malam telah membuat surat pernyataan resmi untuk menghentikan seluruh aktivitas usaha hiburan di lokasi tersebut.

▶▶ Halaman 5

Di Saat Bupati Lakukan Efisiensi Anggaran Dinas DCKTR Justru Rapat di Tanah Karo

Deli Serdang, Jaya Pos

Ada pemandangan ganjil di kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/5/26). Bukannya melayani masyarakat, kantor tersebut dilaporkan nyaris lumpuh lantaran seluruh jajaran struktural, mulai dari Kepala Dinas (Kadis) hingga para Kepala Bidang (Kabid), dikabarkan sedang menggelar rapat di luar daerah, tepatnya di kawasan wisata Berastagi.

Kepergian massal jajaran elit dinas ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Mengapa rapat koordinasi teknis (rakornis) yang seharusnya bisa dilakukan di kantor atau setidaknya di wilayah administrasi Deli Serdang, harus dilakukan jauh-jauh ke daerah wisata?

Berdasarkan informasi yang



Dinas DCKTR rapat ke luar daerah di saat pemda instruksi penghematan anggaran. (Foto: ist)

dihimpun, sejumlah warga masyarakat yang namanya tidak mau disebut hendak mengurus keperluan administrasi di kantor dinas dimaksud, terpaksa gigit jari. Kantor tampak sepi dari pejabat pengambil kebijakan. Kondisi ini dinilai tidak

etis di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

“Kami datang ingin koordinasi terkait urusan tata ruang, tapi kata staf dan security di sana, pimpinan

▶▶ Halaman 5

Satgas Pemberantasan Pungli Irbanko Jakbar Diminta Pantau Sudin Citata

Jakarta, Jaya Pos

Inspektorat Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Kota Administrasi Jakarta Barat diminta terjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) melakukan pemantauan dugaan pungutan liar (pungli) di Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata).

Masyarakat sudah sangat resah, pengurusan Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) sangat melelahkan, bolak-balik, memakan waktu lama. Alasannya berkas masih harus dilengkapi atau diperbaiki dan menunggu persetujuan pimpinan. Kondisi seperti ini sengaja diciptakan agar warga lelah dan pada akhirnya minta bantuan kepada oknum

petugas dengan imbalan uang jasa.

Menurut seorang staf kantor notaris, Hendra (bukan nama sebenarnya), pungli di Sudin Citata Jakbar sudah lama terjadi. Pungli diduga dilakukan melalui oknum juru gambar yang bebas keluar-masuk ruangan pelayanan. Dengan kata lain, tukang gambar bangunan diduga sengaja dipelihara sebagai perantara

alias calo untuk mengisi pundi-pundi pejabatnya.

Sumber lain yang dipercaya menambahkan, Satpel Citata di setiap kantor kecamatan tidak dilibatkan dalam proses pemberkasan penerbitan PBG, semua terpusat di kantor Sudin. Mereka hanya diberi tugas melaku-

▶▶ Halaman 5



Ruangan pelayanan konsultasi Seksi Bangunan dan Gedung Sudin Citata Jakbar. (Foto: tamb)

Kejari Kota Pasuruan Musnahkan 23.295 Pil Koplo dan 164 Gram Sabu Barbuk Kasus Narkotika

Pasuruan, Jaya Pos

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Jawa Timur, menggelar pemusnahan barang bukti dari puluhan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah pada Rabu (20/5/2026). Barang bukti tersebut di antaranya 164,46 gram sabu dan 23.295 butir pil koplo jenis trihexyphenidyl.

Kepala Kejari Kota Pasuruan Douglas Pamino Nainggolan, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan

eksekusi putusan pengadilan terhadap barang bukti yang diputus untuk dimusnahkan.

Selain itu, pemusnahan terhadap barang bukti dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan dari pihak manapun. "Kejaksanaan selaku eksekutor harus segera melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan aturan yang ada ketika perkara itu sudah putus dan inkrah," kata Douglas.

Pemusnahan terhadap barang bukti tersebut berasal dari 42 per-



Kejari Kota Pasuruan memusnahkan puluhan ribu obat terlarang dan ratusan gram sabu serta barang bukti sudah berkekuatan hukum tetap, Rabu (20/5/2026). (foto:ist)

kara. Di antaranya, dua perkara dari tahun 2024, 34 perkara tahun 2025, dan enam perkara dari tahun 2026. Kemudian, dari puluhan perkara tersebut, perkara paling dominan yakni pidana narkotika dan obat terlarang sebanyak 24 perkara.

Lalu, sembilan perkara pencurian, lima perkara ITE, tiga perkara senjata tajam, tiga perkara perlindungan anak, satu perkara penggelapan, dan empat perkara tindak pidana korupsi.

Dalam pemusnahan tersebut,

aparatus memusnahkan sabu seberat 164,46 gram dan 23.295 butir pil koplo jenis trihexyphenidyl. Kemudian, 27 stempel, lima nota kosong, buku kas, kuitansi hingga senjata tajam.

"Untuk barang bukti narkotika dihancurkan dengan cara diblender dan dilarutkan ke dalam air. Sedangkan barang bukti fisik lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujarnya.

(Wio)

BPBD Kabupaten Pasuruan Upayakan Bantuan Makanan dan Pompa Penyedot Imbas Banjir Pulokerto



Foto Banjir rendam Desa Pulokerto Pasuruan. (foto:ist)

Pasuruan, Jaya Pos

Banjir merendam wilayah Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sejak Rabu (20/5/2025) dini hari, belum juga surut hingga Kamis (21/5/2026) siang. Terkait itu, BPBD siapkan pompa air.

Terpantau, banjir paling parah di Dusun Pulodowo dimana puluhan rumah masih tergenang air dengan ketinggian mencapai 30 hingga 50 sentimeter. Kondisi ini membuat aktivitas terganggu. Warga memilih bertahan di rumah karena akses keluar masuk kampung masih dipenuhi air.

Yakin, warga Dusun Pulodowo mengatakan banjir kali ini lebih lama dibanding biasanya karena air laut pasang. Warga jadi tidak bisa ke mana-mana. "Kalau mau keluar harus menerobos banjir. Banyak aktivitas warga memang terganggu," katanya.

Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariadi mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas SDA Jatim untuk mengirim pompa ke lokasi. Bantuan makanan juga akan dikirimkan ke warga terdampak.

"Hari ini kami juga menyiapkan distribusi bantuan makanan dan berkoordinasi dengan SDA agar dibantu pompa," terangnya. (Wio)

Gelar Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Resmi Cabut Perda IMB Perizinan Beralih ke PBG Digital

Sidoarjo, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama DPRD resmi mengakhiri pemberlakuan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini menjadi dasar pengurusan izin bangunan di daerah.

Keputusan tersebut ditandai dengan persetujuan seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan Perda No 4 Tahun 2012 tentang IMB dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (21/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasikh dan dihadiri 34 anggota dewan, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemkab termasuk Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana.

Pencabutan perda tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional yang telah menggantikan sistem IMB menjadi Perizinan Berbasis Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBING).

Juru bicara Fraksi PPP-PKS Komisi C, Vike Widya Asroni, menyebut perubahan aturan itu penting dilakukan agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat.

"Dasar hukum terkait IMB sudah berubah secara nasional, sehingga daerah perlu segera menyesuaikan regulasi agar ada kepastian hukum bagi masyarakat," kata Vike



Suasana Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo cabut Perda IMB. (foto:ist)

dalam penyampaian pendapat akhir fraksi.

Ia menjelaskan, perubahan tersebut merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 yang menggantikan sistem IMB menjadi PBG.

Menurut Fraksi PPP-PKS, penerapan PBG dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik karena proses perizinan dilakukan secara digital dan lebih terintegrasi. Selain itu, sistem baru juga dianggap mendukung tata kelola retribusi daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Meski menyetujui raperda tersebut, Fraksi PPP-PKS memberikan sejumlah catatan

kepada pemerintah daerah, terutama terkait perlunya sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai perubahan mekanisme pengurusan izin bangunan.

Fraksi itu juga meminta pelayanan PBG benar-benar mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian waktu penyelesaian agar tidak menghambat investasi di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengapresiasi kerja sama DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan raperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Menurutnya, pencabutan perda tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan regulasi nasional setelah dilakukannya PP No 36 Tahun 2005 dan digantikan dengan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.

"Dalam PP No 16 Tahun 2021, istilah IMB telah diubah menjadi Perizinan Bangunan Gedung atau PBG," ujar Mimik.

Ia menambahkan, penyesuaian aturan daerah diperlukan agar pelayanan perizinan bangunan di Sidoarjo tetap memiliki landasan hukum yang jelas dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Mimik juga menilai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif menjadi bukti sinergi dalam menghadirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

"Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah bersama DPRD dalam menghadirkan produk hukum yang mencerminkan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (Wio)

Tutup Tahun Ajaran MTsN I Ciamis Sabet Prestasi Akademik dan Non Akademik



Kepsek MTsN I Ciamis Hj Enoch Robiah Adawiyah bersama para siswi yang berhasil meraih prestasi akademik dan non akademik. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Menutup tahun ajaran 2025/2026, prestasi demi prestasi berhasil diraih siswa-siswi MTsN I Ciamis sehingga menambah deretan penghargaan yang mengharumkan nama sekolah tersebut.

Terhitung 8 medali (2 emas, 3 perak dan 3 perunggu) dari 8 mata lomba pada ajang ISO 7 Tingkat Nasional yang diraih Winarni Kelas VII B dan Khoirunnisa VIII D.

Ajang ISO 2026 sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Festival Sains Madrasah 2026 yang bertujuan untuk mendorong integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dalam kompetisi ini, para peserta diuji kemampuan akademik, analisis, serta pemahaman konsep sains terintegrasi dengan wawasan keislaman.

Meski dilaksanakan secara online, namun ajang kompetisi tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan perwakilan sekolah/madrasah di seluruh Indonesia. Pengerjaan soal-soal pun membutuhkan kecekatan dan ketelitian karena berpacu dengan waktu yang telah ditentukan.

Setelah sukses meraih media penghargaan dalam Kompetisi Quizizz Pelajar Nasional secara online yang diselenggarakan oleh Master Sains Channel dan Iqro Learning Center, Winarni dan Khoirunnisa mendapatkan medali emas, perak dan perunggu pada ajang Indonesian Science Olympiad (ISO) 7 2026 yang diselenggarakan oleh Festival Olimpiade Sains Nasional (Fosnas).

Event ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelajar bidang pendidikan terkhusus dalam bidang mata pelajaran tingkat nasional pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Sederajat dan Mahasiswa Tahun 2026.

Dari 11 bidang yang dilombakan untuk tingkatan SMP/MTs/Sederajat, MTsN I Ciamis berhasil mendapatkan 2 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Hj Enoch mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih para pelajar dan berharap mereka menjadi individu yang memiliki semangat kompetitif yang sehat.

Diakuinya menutup tahun ajaran 2025/2026 berbagai prestasi akademik dan non akademik diraih MTsN I Ciamis. Seperti terbaru di presatani non akademik MTsN I Ciamis keluar sebagai juara umum pada ajang LKBB Barracuda Competition yang digelar di SMK N 3 Banjar yang diikuti peserta se Jawa Barat.

(Mamay)

Bupati Mojokerto Kembali Terima Penghargaan atas Dukungan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2026

Mojokerto, Jaya Pos

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai (Kanwil BC) Jawa Timur I atas peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam mendukung pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I pada acara pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama.

Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian pemusnahan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Sebanyak 11.169.440 batang rokok ilegal dimusnahkan dengan total nilai barang yang mencapai Rp 16,6 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp 10,8 miliar.

Barang hasil penindakan tersebut berasal dari wilayah kerja Bea Cukai Sidoarjo yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, mayoritas barang yang dimusnahkan adalah merupakan rokok polos tanpa pita cukai yang diedarkan melalui berbagai modus, mulai dari jasa ekspedisi,



Pemusnahan barang kena cukai. (foto:ad)

kendaraan box, mobil pribadi hingga pedagang eceran.

Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin incinerator bersuhu lebih dari 1.000 derajat Celsius di PT Putra Restu Ibu Abadi hingga barang dipastikan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, pemusnahan yang dilakukan secara simbolis juga dilakukan di halaman Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto dengan cara dibakar.

Rusman Hadi, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I mengungkapkan, hingga Mei 2026 total hasil penindakan Bea Cukai Jawa Timur I bersama enam kantor pelayanan di bawahnya mencapai 118.285.858 batang

rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp 175 miliar dan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 106,4 miliar.

"Target penerimaan cukai nasional tahun 2026 mencapai Rp 225 triliun dan Jawa Timur menyumbang sekitar Rp 78,6 triliun. Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal menjadi sangat penting demi menjaga penerimaan Negara," ungkapnya.

Ia juga mengajak para media dan masyarakat untuk terus mengedukasi pelaku usaha agar memproduksi rokok secara legal dan mematuhi aturan cukai.

Gathot Kuncoro, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Sidoarjo

menyebut, pihaknya telah melakukan 138 kali penindakan sepanjang Januari hingga Mei 2026, dengan 83 di antaranya dilakukan di area pasar.

Namun ia menepis anggapan bahwa penindakan hanya menasar pedagang kecil, penindakan juga dilakukan di area produksi dan distribusi rokok ilegal.

"Barang hasil penindakan dari area pasar hanya sekitar 2,6 persen dari total batang rokok ilegal yang diamankan, selebihnya berasal dari area pabrik dan distribusi," jelasnya.

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang akrab disapa Gus Barra menegaskan bahwa kegiatan terse-

but memiliki makna strategis karena bertepatan dengan momentum Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto.

"Di satu sisi kita memperingati Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-733, di sisi lain kita menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal melalui sinergi dengan Bea Cukai," tegas Gus Barra.

Ia mengatakan, tema Hari Jadi ke-733 Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah "Mojokerto Berdaya, Rakyat Sejahtera, Pembangunan Merata" menjadi pengingat bahwa pembangunan Daerah tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum dan kepatuhan terhadap aturan, optimalisasi DBHCHT harus dibarengi dengan langkah serius menekan peredaran rokok ilegal demi menjaga keberlanjutan pembangunan Daerah.

Bupati menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk terus memperkuat kolaborasi bersama Bea Cukai, TNI, Polri, Satpol PP dan seluruh elemen masyarakat dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.

"Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dan daerah, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," pungkasnya. (Ad)

SMAN 1 Ciamis Satu-Satunya Sekolah Maung di Kabupaten Ciamis



Ciamis, Jaya Pos

Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) rencananya akan mulai diresmikan pada tahun ajaran 2026/2027, di 28 SMAN dan 13 SMKN di berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar Purwanto mengatakan pemilihan sekolah Maung dilakukan berdasarkan usulan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Disdik Provinsi. "Iya itu kan dilakukan berdasarkan usulan dari cabang dinas jadi cabang dinas yang lebih mengetahui kondisi di lingkungannya masing-masing dan setelah itu ditampung," kata Purwanto, Sabtu (9/5).

Pengajuan dari masing-masing KCD itu, lanjut dia, kemudian diverifikasi oleh tim yang sudah dibentuk dan proses itu sudah dilalui. "Itu kemudian menjadi dasar untuk keputusan SK Gubernur," ungkapnya.

Menurutnya, dari 28 SMAN dan 13 SMK Maung, dua diantaranya berada di Kota Bandung yakni SMAN 3 dan 5 Bandung. "Untuk SMA satu kabupaten kota satu, kecuali Bandung ada dua, SMA 3 dan 5 pengecualian, kemudian untuk SMK satu cabang dinas itu satu," ujarnya.

Selain itu, Disdik Jabar pun berencana mengubah nama SMA dan SMK tersebut menjadi Sekolah Maung. Namun, prosesnya harus melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). "Iya (namanya menjadi Sekolah Maung) nanti kita akan usulkan ke kementerian. Kita kalau diizinkan oleh kementerian akan melakukan itu," lanjut Purwanto.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, memastikan Sekolah Maung ini akan berbeda dengan sekolah biasa, meskipun nantinya tetap mengikuti SPMB untuk proses masuknya, namun tidak ada seleksi non-akademiknya. Seperti, prestasi di bidang olahraga dan juga lainnya. "Dua hal, prestasi akademik dan prestasi non-akademik, jadi di Sekolah Maung nanti bukan hanya yang akademiknya baik, tetapi yang berprestasi di bidang olahraga, seni, industri kreatif tetap sekolah disitu. "Nanti kelasnya jadi kelas industri kreatif fokusnya kelasnya kelas olahraga, kelasnya kelas seni," jelasnya.

Dedi menegaskan, Sekolah Maung ini tidak membangun unit sekolah baru, tapi memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya di Kota Bandung yang sekarang menjadi SMAN 3 Bandung nantinya akan diganti menjadi Sekolah Maung.

Meski tidak membangun sekolah baru, nantinya Pemprov Jabar akan melengkapi sejumlah kebutuhan yang menunjang keahlian dari para murid itu sendiri.

Sementara itu, dari hasil pantauan Jaya Pos, SMAN 1 Ciamis resmi ditunjuk menjadi salah satu Sekolah Maung, program sekolah unggulan Pemerintah Provinsi Jabar dengan standar pendidikan di atas nasional.

Penunjukan ini membuat sekolah tersebut bersiap menjalankan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan tahapan yang berlangsung maraton mulai akhir Mei 2026.

Kepala SMAN 1 Ciamis Noor Rahmawati SPd MPd mengatakan, proses sosialisasi program Sekolah Maung bergerak sangat cepat sejak peluncuran SPMB tingkat Jabar.

Setelah kick off dilakukan tingkat provinsi, Senin (18/5), kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi di tingkat Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah XIII yang mencakup Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, lalu diteruskan ke rayon.

Ia menjelaskan, pendaftaran Sekolah Maung dimulai lebih awal dibanding sekolah reguler, yakni pada 25-29 Mei 2026.

Namun, jadwal tersebut bertepatan dengan libur Idul Adha sehingga sekolah harus bekerja lebih cepat. "Karena tanggal 25 dan 26 Mei bertepatan dengan libur Idul Adha, proses pendaftarannya akan berlangsung maraton," katanya.

Sebagai sekolah unggulan, SMAN 1 Ciamis akan menerapkan kualitas pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui perpaduan kurikulum nasional, internasional dan kurikulum spesialisasi. Sejumlah mata pelajaran bahkan akan mengadopsi Kurikulum Cambridge.

Meski mengusung standar internasional, Noor menegaskan siswa tetap dibekali penguatan budaya lokal. "Tujuannya agar lulusan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi tetapi tetap memiliki akar budaya Sunda yang kuat serta komitmen mengabdikan di Jawa Barat," jelasnya.

Menurut Noor, calon peserta didik juga harus melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan siswa memiliki prestasi dan kesiapan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sistem belajar di Sekolah Maung pun berbeda dari sekolah umum. Siswa akan menjalani pola pembelajaran full day plus. Kegiatan belajar berlangsung Senin sampai Jumat pukul 07.00 hingga 17.00 Wib, sedangkan Sabtu tetap masuk mulai pukul 07.30 sampai 14.00 Wib.

Selain itu, sekolah tengah menyiapkan kurikulum spesialisasi seperti bidang olahraga dan seni, termasuk rencana pengembangan sanggar seni berbasis budaya lokal.

Pendampingan menuju Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga disiapkan melalui lima tahap pembinaan sejak siswa berada di kelas 10.

Dari sisi kuota, jumlah siswa di Kelas Maung dibatasi maksimal 32 orang per rombongan belajar dengan total 12 rombel, lebih sedikit dibanding kelas reguler yang biasanya menampung 36 hingga 42 siswa.

Sementara untuk seleksi, penerimaan dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur Potensi Akademik memiliki kuota 10 persen dengan syarat IQ minimal 130. Kemudian Jalur Kompetensi Akademik mendapat kuota terbesar yakni 70 persen dengan syarat rata-rata nilai rapor minimal 85. Jalur Prestasi Non-Akademik menyediakan kuota 20 persen bagi siswa peraih prestasi minimal tingkat provinsi dengan nilai kompetensi prestasi minimal 80. (Mamay)

Keluarga Kuat Kunci Jabar Istimewa

Bandung, Jaya Pos

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Kadis DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti menegaskan bahwa kekuatan keluarga merupakan pondasi utama pembangunan masyarakat Jawa Barat (Jabar). Ia menyebut kesehatan reproduksi sebagai salah satu pilar penting ketahanan keluarga yang tidak boleh diabaikan. "Kalau keluarga-keluarga di Jawa Barat kuat, maka Jawa Barat akan istimewa," ujar Siska saat membuka acara webinar bertajuk "Ngobrol Sehat Reproduksi" dengan tema Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami dan Jaga Masa Depan Keluarga, Rabu (20/5). Kegiatan diikuti sekitar 900 peserta secara daring.

Siska mengingatkan bahwa jumlah penduduk Jabar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hampir menyentuh 51 juta jiwa. Angka besar itu, kata dia, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi.

Ia merinci setidaknya empat permasalahan utama terkait kesehatan reproduksi yang masih dihadapi Jawa Barat saat ini. Pertama, masih terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kedua, masih adanya praktik perkawinan anak. Ketiga, munculnya perilaku berisiko di kalangan remaja. Keempat, masih rendahnya literasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

Terkait perkawinan anak, Siska mengakui bahwa upaya penekanan telah membuahkan hasil. Angka dispensasi kawin di Jawa Barat berhasil ditekan



Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti sewaktu menggelar webinar. (Foto:Mamay)

hingga menyisakan sekitar 3.000 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perkawinan anak yang tidak tercatat masih menjadi persoalan tersendiri yang perlu diwaspadai bersama.

"Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya kan belum matang. Nanti ke sananya aduh, masalahnya banyak, ada kehamilan, ada persalinan, perdarahan pada saat persalinan, dan lain sebagainya dan ini nanti mendorong ke arah kematian ibu pada saat melahirkan," ujar Siska.

Ia juga mengingatkan bahwa perkawinan anak turut berkontribusi terhadap risiko stunting. Bayi yang dilahirkan dari perkawinan anak, menurut Siska, memiliki kemungkinan 40 persen lebih tinggi mengalami stunting

dibandingkan bayi yang lahir dari pasangan yang sudah matang secara usia dan fisik.

Siska juga menyoroti fenomena perilaku berisiko pada remaja yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut mudahnya akses terhadap konten pornografi melalui gawai sebagai salah satu pemicu utama. Kondisi itu, kata dia, tecermin dari tingginya angka pengonsumsi lembaga pemasyarakatan anak akibat tindak asusila. "Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, itu dari 200-an sekian anak binaan. Dari jumlah itu, 90 persen itu karena tindakan asusila," ungkap Siska. Ia menilai hal itu didorong oleh minimnya pengetahuan dan panduan yang memadai bagi para remaja.

Merespons kondisi tersebut, Siska menegaskan bahwa

program keluarga berencana kini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian jumlah penduduk.

Siska turut meluruskan kesalahpahaman yang kerap muncul di masyarakat, yakni anggapan bahwa edukasi kesehatan reproduksi identik dengan pendidikan seks. Ia menekankan bahwa pemahaman tentang organ reproduksi, baik pada laki-laki maupun perempuan, merupakan kebutuhan dasar setiap keluarga demi menjaga kualitas tumbuh kembang generasi penerus.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari menjelaskan, webinar menghadirkan narasumber dokter spesialis obgyn Yassin Yanuar Muhammad dan Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Anak

Indonesia (YMPAI) Julie Rostina, dengan dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) sekaligus founder Family Journalism Najip Hendra SP.

Adapun peserta webinar merupakan kader lini lapangan, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader posyandu.

Menutup sambutannya, Siska mengajak seluruh peserta untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan keluarga Jabar yang berkualitas. Ia merujuk pada konsep Panca Waluya yang digaungkan Gubernur Jabar sebagai visi pembangunan sumber daya manusia daerah. "Dengan keluarga yang kuat sehat, maka kita yakin SDM Jabar akan Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer," pungkasnya. (Mamay)

Bupati Sukabumi Pimpin Upacara Harkitnas Ke 118

Sukabumi, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (20/5/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H Asep Japar, sementara komandan upacara Ipda Tri Yuda Rinaldy Ruslan dari Polres Sukabumi.

Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viafa Hafid yang dibacakan H Asep Japar menekankan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus hidup dan menyesuaikan tantangan zaman.

Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional yang berakar dari lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 menjadi simbol perubahan perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual



Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Forkopimda. (foto: ist)

dan diplomasi.

"Semangat 1908 adalah tonggak di mana perjuangan bangsa mulai melampaui sekat-sekat kedaerahan demi kedaulatan yang bermartabat," kata Bupati membacakan sambutan menteri.

Ia menyebut tantangan bangsa kini telah bergeser. Jika dahulu perjuangan berfokus pada merebut kemerdekaan wilayah, maka saat ini

Indonesia menghadapi pertarungan baru dalam menjaga kedaulatan informasi dan ruang digital.

Tema Harkitnas tahun ini, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", disebut menjadi penguat pentingnya perlindungan generasi muda di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media digital.

Pemerintah, lanjutnya,

telah menjalankan sejumlah program strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.

Di bidang ekonomi desa, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa. Program itu diharapkan mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Tak hanya itu, isu perlindungan anak di ruang digital turut menjadi sorotan utama. Pemerintah disebut telah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026 adalah penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi.

Melalui momentum Harkitnas, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalaikan semangat persatuan dan gotong royong ala Boedi Oetomo.

Menurutnya, kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peringatan sejarah, melainkan gerakan kolektif untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas. (Yud)

PGRI Ciamis Juara Puspa Swara Wanoja Sunda

Bandung, Jaya Pos

Tim Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ciamis sukses menjadi juara terbaik pada putaran final lomba paduan suara Puspa Swara Wanoja Sunda yang digelar Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP PKK) Jawa Barat (Jabar) di Bale Gede Pakuan (Gedung Pakuan), Kota Bandung, Minggu (17/5). Putaran final diikuti 10 tim terbaik hasil penjurian pada babak penyisihan di lima kota di Jawa Barat.

Lomba yang digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ini diikuti 63 tim dari empat organisasi perempuan tingkat kabupaten/kota se-Jabar. Empat organisasi tersebut terdiri atas PKK, PGRI, Persatuan Istri Tentara (Pesisit) Kartika Chandira Kirana (KCK) dan Persatuan Istri Anggota Polri Bhayangkari. Pemenang ditentukan oleh tiga juri dari kalangan akademisi, praktisi dan musisi.

Dengan ditetapkannya sebagai pemenang Juara I,

tim PGRI Kabupaten Ciamis berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 50 juta rupiah, piala, dan piagam penghargaan.

Setelah PGRI Ciamis, PGRI Kabupaten Purwakarta mengungguli sebagai juara II dan TP PKK Kabupaten Pangandaran sebagai Juara III. Dua terbaik tersebut berhak membawa pulang hadiah masing-masing Rp 35 juta dan Rp Rp 25 juta.

Adapun Juara Harapan I TP PKK Kabupaten Cianjur, Juara Harapan II PGRI Kota Bandung, dan Juara Harapan III PGRI Kabupaten Bandung masing-masing berhak mengantongi hadiah uang tunai masing-masing Rp 20 juta, Rp 17,5 juta, dan Rp 15 juta. Jumlah masing-masing pemenang ini belum termasuk tambahan Rp 20 juta dari kantong pribadi Gubernur Dedi Mulyadi yang diberikan merata kepada masing-masing finalis.

Dedi menjelaskan, sebagai sorang pemimpin yang mencintai seni dan kebudayaan secara khusus



Ketua TP PKK Jabar Siska Gerfianti bersama Tim PGRI Kabupaten Ciamis. (Foto:Mamay)

meminta Ketua TP PKK Jabar Siska Gerfianti untuk menyelenggarakan lomba paduan suara bagi organisasi perempuan. Dia beralasan paduan suara memiliki kaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang dia jalankannya. Di mana dia lebih mengutamakan suara hati untuk menjalankan roda pemerintahan Jabar. "Saya sangat mencintai kejujuran. Kepemimpinan yang jujur senantiasa mendengarkan suara hati ketimbang terpaku pada anggaran. Seni berkaitan

erat dengan suara hati. Di sinilah bertemu antara seni dengan kepemimpinan yang berpihak kepada kebutuhan rakyat," jelasnya.

Dalam laporannya, Ketua TP PKK Jabar Siska Gerfianti mengungkapkan, lomba paduan suara diikuti 63 kelompok dari empat organisasi perempuan. Para finalis yang hari ini unjuk gigi di Bale Gede Pakuan merupakan para pemenang pada babak penyisihan yang dilaksanakan di Bogor, Purwakarta, Cirebon, Garut dan Bandung. Penilaian dilaku-

kan oleh tim juri independen yang terdiri atas dosen Program Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), praktisi seni pertunjukkan, dan musisi.

Siska memberikan apresiasi kepada para peserta yang telah menampilkan kemampuan terbaiknya dalam lomba ini. Sosok perempuan tangguh dan energik ini mengaku puas dengan penampilan para peserta. Saking bagusnya, Siska mengaku tidak akan sanggup memilih juara jika ditugaskan menjadi juri.

Siska secara khusus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Dedi Mulyadi yang telah menginisiasi lomba paduan suara bagi organisasi perempuan tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar ini juga berterima kasih kepada Bank BJB yang telah mensponsori lomba serta para pihak yang telah mendukung acara.

(Mamay)

Polres Way Kanan Raih 4 Penghargaan dari KPPN Kotabumi

Way Kanan, Jaya Pos

Kinerja pengelolaan keuangan Polres Way Kanan Polda Lampung kembali mendapat apresiasi. Dalam kegiatan sosialisasi digitalisasi layanan KPPN dan monev pelaksanaan Anggaran TA 2025 sd Triwulan II 2026, Polres Way Kanan berhasil meraih 4 penghargaan dari KPPN Kotabumi.

Penghargaan tersebut diberikan Kepala KPPN Kotabumi Tejo Prakosa yang diterima langsung oleh Kapolres Way Kanan di Aula Payan Mas Kantor KPPN Kotabu-

mi, Lampung Utara pada Kamis (21/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 10.00 Wib itu menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi bagi berbagai instansi pemerintah yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus penerapan sistem pembayaran digital yang efektif dan transparan.

Di penghargaan tersebut, Polres Way Kanan dalam kategori pertama sebagai Satuan Kerja



Polres Way Kanan berhasil meraih 4 penghargaan dari KPPN Kotabumi. (foto:ist)

(Satker) peraih penghargaan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tahun 2025 dengan nilai transaksi terbesar pertama.

Kedua sebagai satker peraih penghargaan Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan tahun 2025, lalu ketiga sebagai satker peraih penghargaan pengguna Cash Management System (CMS) tahun 2025 dengan nilai transaksi terbesar dan jumlah transaksi terbanyak ketiga.

Penghargaan keempat sebagai satker peraih nilai capaian tertinggi pada indikator kinerja pelaksanaan

anggaran (IKPA) tahun 2025 dengan nilai 100.

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kumianto SIK menyampaikan apresiasi atas pemberian penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal ini Kepala KPPN Kotabumi. Atas pencapaian ini, Kapolres pun mengucapkan terima kasih kepada PS Kasikeu Polres Way Kanan Aipda Dwi Hadiyanto SH dan seluruh tim satuan kerja yang telah mampu bekerja keras membawa nama baik institusi Polres Way Kanan. (Suhaili)

Wabup Sampaikan Penjelasan 8 Ranperda di Paripurna



Sidang Paripurna DPRD bahas 8 ranperda yang diajukan Pemkab Deli Serdang. (foto:ist)

Lubuk Pakam, Jaya Pos

Wakil Bupati (Wabup) Delil Serdang Lom Lom Suwondo SS menyampaikan penjelasan bupati terhadap 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Kamis (21/5/2026).

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Agustian Saragih bersama Wakil Ketua Kuzu SW Tarigan, kedelapan ranperda tersebut yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Peresetujuan Bangunan Gedung, Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (oleh Bapemperda), Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli, Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan, dan Pemekaran Kecamatan Sunggal dan Pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan serta Penggabungan Bagian Kecamatan Pancur Batu ke Dalam Kecamatan Sunggal Selatan.

Lom Lom menegaskan bahwa 8 ranperda yang diajukan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.

Dijelaskan bahwa Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan memperkuat pengelolaan aset daerah agar lebih efektif, terstruktur, dan optimal dalam mendukung pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda No 1 Tahun 2024, sekaligus menyesuaikan sistem perpajakan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"Pada Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung, pemerintah daerah menekankan pentingnya regulasi yang mampu menjamin keamanan, estetika, lingkungan, serta keteraturan tata ruang yang berkelanjutan," terangnya.

Selain itu, Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren disusun sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pesantren sebagai bagian integral dari budaya dan pendidikan di Deli Serdang.

Untuk sektor tata ruang, perubahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 dinilai penting guna menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat selama dua dekade mendatang, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Terkait Ranperda Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Deli, Pemkab Deli Serdang merencanakan penyertaan modal selama tiga tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2028, dengan total sebesar Rp150 miliar dalam bentuk uang dan barang.

"Penyertaan modal ini adalah investasi untuk masa depan air minum di Deli Serdang. Ini bukan sekadar transfer dana, tetapi sebuah strategi untuk menyelamatkan BUMD kita, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong perekonomian daerah," jelas Lom Lom.

Sementara itu, Ranperda tentang Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan serta Pemekaran Kecamatan Sunggal dan Pembentukan Kecamatan Sunggal Selatan diajukan sebagai respons atas tingginya pertumbuhan penduduk dan beban administrasi wilayah.

Pemda menilai pemekaran kecamatan akan memperkuat efektivitas pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, perizinan usaha hingga pembangunan infrastruktur yang lebih dekat dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Di akhir sambutan, bupati mengajak seluruh anggota DPRD dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendukung proses pembahasan 8 ranperda tersebut demi memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

"Seluruh rancangan peraturan daerah ini bukan semata-mata dokumen administratif, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama untuk mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," tutupnya sembari mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendukung proses pembahasan delapan Ranperda tersebut demi memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Turut hadir para camat, dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. (Rd)

Pemkab Simalungun Gelar Berbagai Pelayanan Kepada Masyarakat di Acara MTQ ke-52

Simalungun, Jaya Pos

Gelaran akbar Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-52 tingkat Kabupaten Simalungun tahun 2026 yang berpusat di Lapangan Bola Kaki PTPN IV Regional I Kebun Bangun, Kecamatan Gunung Malela, berlangsung dengan penuh khidmat, meriah, dan lancar, Rabu (20/5/2026).

Ajang yang mengusung semangat memperdalam pemahaman dan penghayatan Al-Qur'an ini ternyata tidak hanya menjadi wadah perlombaan bagi para qari dan qariah, juga dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun sebagai sarana mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat luas.

Sejak kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih, pada Senin (18/5/2026) lalu hingga memasuki hari ketiga penyelenggaraan, kehadiran pemerintah daerah dirasakan nyata melalui berbagai jenis layanan unggulan yang dibuka secara gratis bagi seluruh pengunjung dan warga sekitar.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Simalungun untuk selalu hadir dan memberikan kemudahan akses layanan dasar di tengah masyarakat, kapan pun dan di mana pun.

Salah satu layanan yang paling banyak peminatnya adalah pelayanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sejak hari pertama pembukaan stan pelayanan, warga sudah berdatangan dengan antusias untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Ber-



Berbagi pelayanan kepada masyarakat di acara MTQ ke 52 tahun 2026. (Foto: ist)

bagai kebutuhan dokumen kependudukan dapat diurus langsung di lokasi acara, mulai dari penerbitan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga sosialisasi dan penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selama kegiatan berlangsung, pelayanan yang dibuka Dinas Kependudukan dan Catatan ini hingga hari ketiga, tercatat ratusan warga telah dilayani dan mendapatkan kemudahan penyelesaian administrasi tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor dinas.

Tidak kalah menariknya, kehadiran layanan dari Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simalungun juga melakukan layanan kepada masyarakat yang mendampingi Mobil Pintar atau perpustakaan keliling ke lokasi MTQ.

Kendaraan yang penuh dengan koleksi buku bacaan, referensi, dan bahan pengetahuan ini menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda yang hadir. Mereka tampak antusias menyusuri deretan buku yang tersedia, menjadikan momen kehadiran di acara MTQ sekaligus sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, perhatian ter-

hadap kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas utama. Dinas Kesehatan turut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan membuka pos pelayanan kesehatan gratis.

Tim medis dan tenaga kesehatan bersiaga sepanjang acara berlangsung, memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pertolongan pertama bagi siapa saja yang membutuhkan. Keberadaan pos kesehatan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta, panitia, maupun warga yang memadati lokasi acara.

Beragamnya layanan yang digelar secara bersamaan dengan ajang MTQ ini mene-

gaskan bahwa kegiatan keagamaan juga dapat menjadi wadah efektif untuk pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang momen berkumpulnya masyarakat dalam jumlah besar ini sebagai peluang strategis untuk memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi dengan baik.

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan MTQ Ke-52 Kabupaten Simalungun berlangsung selama tiga hari, terhitung mulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2026, dengan mempertandingkan berbagai cabang keahlian Al-Qur'an dari tingkat anak-anak hingga dewasa. (Rd)

Bapas Tanjungpandan Perkuat Sinergi Lintas Sektor Dukung Pidana Kerja Sosial dan Perlindungan ABH

Belitung, Jaya Pos

Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah mitra strategis dan instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan, implementasi pidana kerja sosial, pembimbingan Klien Pemasarakatan, serta pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapas Kelas II Tanjungpandan itu melibatkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Pemerintah Desa Air Saga, Lazismu Belitung, PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTU Belitung, serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Belitung.

Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan, Muhamad Irfani, menegaskan bahwa hadirnya KUHP Nasional membawa perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang kini lebih menekankan



Bapas Tanjungpandan Perkuat Sinergi Lintas Sektor dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dukung Pidana Kerja Sosial dan Perlindungan ABH. (Foto/Yus)

aspek pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.

Menurutnya, Bapas memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pidana nonpemenjaraan, termasuk pidana kerja sosial, pendampingan, pembimbingan, hingga pengawasan Klien Pemasarakatan. Karena itu, dukungan lintas sektor dinilai menjadi kunci agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan optimal.

"Pidana kerja sosial men-

jadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang lebih humanis dan produktif. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan Klien Pemasarakatan tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali diterima secara positif di tengah masyarakat," ujar Irfani.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung,

Febriansyah, menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di daerah.

Ia menjelaskan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) selama ini menjalankan berbagai langkah preventif, mulai dari edukasi sosial, penguatan peran keluarga, asesmen dan kajian sosial, hingga rehabilitasi dan

pendampingan psikososial bagi anak maupun kelompok rentan.

"Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat," katanya.

Pihaknya juga menyatakan kesiapan mendukung program pembimbingan Klien Pemasarakatan, khususnya bagi anak dan kelompok rentan, melalui pendekatan rehabilitatif serta penguatan lingkungan sosial yang sehat dan kondusif.

Melalui penandatanganan PKS tersebut, Balai Pemasarakatan Kelas II Tanjungpandan berharap terbangun kerja sama berkelanjutan dalam mendukung implementasi KUHP Nasional, optimalisasi pidana kerja sosial, penguatan pembimbingan Klien Pemasarakatan, serta peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Yustami)

Mahasiswa Teknik Mesin UKI Perdalam Teknologi EV dan Energi Terbarukan Bersama Praktisi NBRI

Jakarta, Jaya Pos

Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengikuti kuliah lapangan bersama praktisi Electric Vehicle (EV) dari National Battery Research Institute dalam rangka memperdalam wawasan mengenai teknologi baterai dan energi terbarukan.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam Simposium EV yang digelar pada 20-21 Mei 2026 di JIExpo Kemayoran dengan menghadirkan Founder NBRI Prof Dr rer nat Evvy Kartini, sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teknologi baterai nasional.

Kuliah lapangan ini diprakarsai oleh dosen pengampu mata kuliah Material Handling, Fisika Listrik dan Magnet, serta Material Teknik Melya Dyanasari Sebayang



Mahasiswa Teknik Mesin UKI bersama pakar. (foto/melcan)

SSi MT. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga perlu berinteraksi langsung dengan praktisi dan pelaku industri agar mampu memahami perkembangan teknologi secara nyata.

"Mahasiswa harus mampu melihat langsung bagaimana perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi baterai yang kini menjadi

fokus masa depan Indonesia," ujarnya.

Pada hari pertama simposium, peserta mendapatkan materi bertema "Advancing Battery Technology For A Sustainable EV Future In Indonesia", yang membahas perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik untuk mendukung kegiatan organisasi APRI, serta membahas transportasi ramah lingkungan di Indonesia.

Sementara pada hari kedua, mahasiswa mengikuti diskusi bertema "Nickel's Future in The EV Battery Ecosystem: Too Expensive to Compete?" yang mengupas tantangan dan prospek nikel Indonesia dalam ekosistem baterai kendaraan listrik global.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mempelajari berbagai aspek teknologi baterai otomotif, mulai dari pengembangan material katoda, efisiensi energi, hingga pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung industri EV di Indonesia dan Asia. Mereka juga memperoleh wawasan dari mahasiswa berbagai universitas lain yang telah berhasil mengembangkan inovasi berbasis teknologi kendaraan listrik, serta dari para pembicara internasional yang hadir dalam forum tersebut. (Red)

9 WNI Misi Global Sumud Flotilla Halaman 1

(21/5/2026).

Menurut Sugiono, proses evakuasi dilakukan secara bertahap dari wilayah Israel menuju Istanbul, Turki. Setelah itu, para WNI akan diterbangkan kembali ke Indonesia.

la menegaskan perkembangan positif tersebut merupakan hasil koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pengecatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 oleh militer Israel. Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI disebut telah mengoptimalkan seluruh jalur diplomatik untuk memastikan keselamatan sembilan WNI tersebut.

Sugiono juga mengapresiasi peran sejumlah perwakilan RI di luar negeri yang ikut terlibat dalam proses pembebasan dan pemulangan para relawan. Di antaranya KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.

WNI Mengaku Alami Kekerasan Saat Ditahan

Meski telah dibebaskan, para relawan Indonesia mengaku mengalami perlakuan kasar selama ditahan aparat Israel.

Kepala Perwakilan KJRI Istanbul, Darianto Harsono, mengatakan sembilan WNI sempat mengalami kekerasan fisik selama proses interrogasi dan penahanan yang berlangsung sekitar tiga hingga empat hari.

"Kami bersyukur sembilan saudara kita dalam kondisi sehat walafiat, walaupun selama tiga sampai empat hari mengalami kekerasan fisik," kata Darianto dalam video yang dibagikan melalui akun media sosial Menlu RI, Jumat (22/5/2026).

la mengungkapkan beberapa relawan mengaku mendapat tindakan kekerasan berupa tendangan, pukulan, hingga sengatan listrik selama masa penahanan.

"Ada yang ditendang, dipukul, bahkan disetrum," ujarnya.

Saat ini, seluruh WNI berada di bawah pendampingan KJRI Istanbul sambil menunggu proses pemulangan ke Indonesia selesai.

Daftar 9 WNI dalam Misi Global Sumud Flotilla

Berdasarkan data Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), berikut sembilan WNI yang ikut dalam misi ke-

manusiaan menuju Gaza:

- * Andi Angga Prasadewa
- * Rahendro Herubowo
- * Andre Prasetyo Nugroho
- * Thoudy Badai
- * Bambang Noroyono (Abeng)
- * Herman Budiarto Sudarsono
- * Ronggo Wirasano
- * Asad Aras Muhammad
- * Hendro Prasetyo

Mereka berada di sejumlah kapal berbeda dalam armada Global Sumud Flotilla yang berlayar menuju Jalur Gaza membawa bantuan kemanusiaan.

Indonesia Kecam Tindakan Israel

Pemerintah Indonesia mengecam keras dugaan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat Israel terhadap para relawan kemanusiaan, termasuk WNI.

Sugiono menegaskan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan Israel terhadap WNI pada saat penahanan," tegas Sugiono.

Menurutnya, aksi kekerasan terhadap relawan kemanusiaan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh proses pemulangan berjalan aman dan lancar.

Armada Bantuan Gaza Dicegat di Laut Mediterania

Sebelumnya, armada bantuan Global Sumud Flotilla dicegat militer Israel saat melintas di perairan internasional Laut Mediterania pada Selasa (19/5/2026).

Lebih dari 50 kapal yang membawa sekitar 430 aktivis kemanusiaan dan jurnalis internasional menuju Jalur Gaza dihentikan aparat bersenjata Israel.

Mayoritas relawan kemudian dideportasi melalui Bandara Ramon di Israel selatan dan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv.

Pencegatan tersebut memicu kecaman luas dari komunitas internasional karena dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat misi kemanusiaan untuk Gaza.

Satgas Pemberantasan Pungli Irbanko Halaman 1

kan pengawasan dan pencertification bangunan serta pengendalian tara ruang di wilayah masing-masing. "Sudin Citata Jakbar berbeda dengan Sudin Citata di wilayah kota Jakarta adalah jati diri. Ketika budaya terus dijaga dan ditampilkan dengan penuh kecintaan, maka daerah akan memiliki kekuatan karakter yang luar biasa. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Sunda," ujar Hj Kania.

Ditegaskannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama TP PKK akan terus mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat, identitas daerah, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Ajang final "Puspa Swara Wanoja Sunda" sendiri mempertemukan 10 finalis terbaik hasil seleksi dari total 63 tim peserta yang berasal dari unsur PKK, PGRI, Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari se-Jabar.

Adapun 10 besar finalis yang tampil pada babak final di Bale Gede Pakuan yakni PGRI Kota Bandung, Persit Kota Bogor, PKK Kabupaten Pangandaran, PKK Kota Banjar, PKK Kabupaten Cianjur, PGRI Kabupaten Purwakarta, PGRI Kabupaten Ciamis, PGRI Kabupaten Bandung, Bhayangkari Kabupaten Garut dan PKK Kota Bandung.

Prestasi ini sekaligus mempertegas bahwa Kabupaten Ciamis tidak hanya fokus pada pembangunan daerah, namun juga konsisten hadir sebagai daerah yang aktif menjaga, mengembangkan dan mengharumkan seni budaya lokal hingga tingkat Provinsi Jabar. (Mamay)

di Wilayah Jakarta yang dilakukan pada UU Cipta Kerja, PP No 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2024 Tentang Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Pergub DKI No 20 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Tata Bangunan, seharus-

nya pengurus PBG semakin mudah dan cepat. Tetapi pada kenyataannya justru semakin sulit dan lambat.

Kepala Sudin Citata Jakbar Lucia Purbarini Soepardi dan Kepala Seksi PBG Joni Setiawan memilih bungkam, enggan menerima wartawan, sehingga sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. (T'ambunan)

Bupati Tangerang Sidak Tempat Hiburan Halaman 1

"Yang bersangkutan sudah menyatakan, tidak akan melaksanakan aktivitas usaha hiburan malam. Dan sudah menandatangani surat pernyataan di atas segel, disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir pada acara musyawarah," kata Maesyal.

Pihaknya berharap langkah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjaga ketertiban lingkungan di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif bagi seluruh warga dan juga para aktivitas usahanya di situ tidak lagi melaksanakan usaha hiburan yang meresahkan masyarakat," harapnya.

Saat ditanya terkait sanksi apabila pengelola kembali membuka usaha hiburan malam tersebut, Bupati menegaskan bahwa pengelola siap menerima konsekuensi hu-

kum sesuai pernyataan yang telah dibuat.

"Mereka sudah menyatakan apabila dia melaksanakan lagi, pemilik usaha siap untuk diproses secara hukum," tegasnya.

Dari pantauan Jaya Pos di lapangan, selama bertahun-tahun belakangan, peristiwa seperti ini bukan pertama terjadi. Di Kabupaten Tangerang, ini sudah merupakan hal biasa, timbul dulu permasalahan baru ada reaksi dari Pemkab Tangerang dan Forkopimda setempat.

Sebenarnya, masih banyak permasalahan khususnya di kawasan Pemkab Tangerang yang belum tertangani. Yakni, kawasan Puspemkab Tangerang menjadi sarang gelandangan dan pengemis (gepeng), taman di bawah pepohonan menjadi tempat maksiat dan tidak adanya

Relawan Asing Juga Mengaku Disiksa

Tidak hanya relawan asal Indonesia, sejumlah aktivis dari negara lain juga mengaku mengalami kekerasan selama penahanan.

Aktivis asal Belgia, Julien Cabral, mengaku dipukul hingga mengalami luka di wajah saat kapalnya diserbu marinir Israel. "Aku mendengar mereka berkata dalam bahasa Inggris, 'Let's have some fun'," kata Cabral kepada AFP.

la juga menyebut para relawan ditampar, dihina secara verbal, dan dipersulit mendapatkan makanan maupun air selama ditahan.

Sementara jurnalis Italia, Alessandro Mantovani, mengaku diborgol dan dirantai saat dideportasi ke Yunani. "Dibawa ke bandara dalam kondisi tangan diborgol dan kaki dirantai," ujarnya.

Kecaman Dunia Internasional Menguat

Aksi pengecatan armada bantuan Gaza turut memicu reaksi keras dari berbagai negara.

Sejumlah menteri luar negeri dari negara seperti Spanyol, Brasil, dan India mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam blokade tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.

Sorotan juga tertuju pada Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, setelah mengunggah video kontroversial yang memperlihatkan para aktivis dalam kondisi tangan terikat.

Video itu memicu kemarahan internasional hingga beberapa negara seperti Prancis, Kanada, Spanyol, Portugal, dan Belanda memanggil duta besar Israel sebagai bentuk protes diplomatik. Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyebut tindakan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima".

Sementara Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, meminta Uni Eropa membahas kemungkinan sanksi terhadap Ben-Gvir.

Di tengah memanasnya situasi diplomatik, pemerintah Turki dilaporkan telah mengevakuasi sedikitnya 422 orang, termasuk 85 warga negara Turki, menggunakan pesawat sewaan. Tim medis dan ambulans juga disiagakan di Bandara Istanbul untuk menangani relawan yang mengalami luka akibat penahanan. (red)

25 KUA Terima Laptop dan Printer Halaman 1

25 KUA penerima bantuan, 8 Kepala Kantor Kemenag Pandeglang, H. Lukmanul Hakim, mengaku belum diminta menyertakan Rp500 ribu. Sementara itu, 17 KUA lainnya diminta membayar Rp300 ribu karena hanya menerima salah satu perangkat.

Dari 17 KUA tersebut, 11 KUA diketahui hanya menerima printer, sedangkan 6 KUA lainnya hanya mendapatkan laptop.

Pemintaan setoran itu disebut disampaikan melalui pengumuman di grup WhatsApp Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI). Dalam pesan tersebut, KUA penerima bantuan diminta mentransfer uang ke rekening APRI Kabupaten Pandeglang.

Kepala Kantor Kemenag Pandeglang, H. Lukmanul Hakim, mengaku belum mengetahui adanya dugaan pungutan tersebut saat dikonfirmasi. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Waduh saya harus cek dulu, yang minta siapa dan yang diminta siapa, nanti saya telpon dan panggil. Saya juga belum tahu kapan penerimaannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Pandeglang, H. Maman Mansyur, membenarkan adanya informasi terkait pungutan tersebut. Ia menyebut hal itu berkaitan dengan kebutuhan

kegiatan APRI, namun menegaskan nominal yang dimaksud tidak sebesar informasi yang beredar.

"Untuk kegiatan APRI dan sudah pernah dikonsultasikan, tapi tidak sebesar itu nominalnya. Distribusi laptop dan printer memang di Bimas, tapi pembagian KUA penerima saya serahkan ke koordinasi APRI dengan staf saya," katanya.

Ketua APRI Kabupaten Pandeglang, Dedi Mulyadi, juga membenarkan adanya pengumpulan dana tersebut. Ia menyebut dana itu merupakan bentuk partisipasi untuk mendukung kegiatan organisasi APRI, serta menegaskan tidak semua KUA menerima

bantuan karena menyesuaikan kebutuhan.

"Tidak semua KUA mendapat laptop, itu berdasarkan kebutuhan. Ada juga partisipasi untuk menunjang kegiatan APRI," ujarnya.

Perlu diketahui, praktik permintaan biaya tanpa dasar aturan yang jelas dalam penyaluran bantuan pemerintah dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli. (Yan)

Di Saat Bupati Lakukan Efisiensi Anggaran Halaman 1

dan semua Kabid sedang rapat di Berastagi. Apa sebegini mendesaknya sampai harus ke luar daerah? Padahal, anggaran daerah harusnya digunakan seefisien mungkin," celoteh sumber kesal.

Publik kini menyoroti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas. Berdasarkan aturan, perjalanan dinas harus memenuhi

prinsip selektif dan efisien. Rapat di luar daerah yang melibatkan seluruh pejabat struktural sekaligus seringkali dianggap sebagai pemborosan anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kinerja.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas jalannya roda organisasi selama para pejabat tersebut berada di luar kota?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DCKTR Deli Serdang mengenai agenda rapat tersebut karena tidak merespon konfirmasi Jaya Pos yang disampaikan melalui panggilan WA. Apakah kegiatan di Berastagi ini merupakan agenda mendesak bersifat strategis, atau sekadar pelarian dari rutinitas kantor?

Masyarakat kini menanti jawaban tegas dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait urgensi kegiatan tersebut. Fenomena rapat jauh ini diharapkan menjadi catatan bagi Inspektorat untuk lebih ketat mengawasi perjalanan dinas yang menggunakan anggaran negara, agar tidak terkesan sebagai sarana rekreasi bagi para pejabat daerah. (HM)

PGRI Ciamis Sabet Juara 1 Paduan Suara Halaman 1

di, Minggu (17/5).

Ajang bergengsi yang mengusung tagline "Ngaguar Asih, Ngahudangeun Rasa" ini diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jabar sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi organisasi perempuan sekaligus memperingati Hari Jadi Tatar Sunda.

Keberhasilan PGRI Kabupaten Ciamis menjadi juara tidak hanya menegas-

kan kualitas seni budaya daerah, tetapi juga menunjukkan semangat para pendidik dalam menjaga dan melestarikan budaya Sunda melalui karya seni yang penuh penghayatan. Penampilan harmonis, kuat secara vokal, dan sarat nuansa budaya Sunda berhasil memukau dewan juri maupun tamu undangan yang hadir di Gedung Pakuan.

Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis Hj Kania Ernawati Herdiat yang turut hadir

mendampingi langsung delegasi Kabupaten Ciamis, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas capaian luar biasa tersebut. "Alhamdulillah, ini menjadi kebanggaan besar bagi Kabupaten Ciamis. Prestasi ini menunjukkan bahwa semangat melestarikan budaya Sunda di Kabupaten Ciamis terus tumbuh dan berkembang. Kami sangat mengapresiasi seluruh anggota PGRI Kabupaten Ciamis yang telah menampilkan kemampuan terbaiknya hingga berhasil meraih Juara 1 tingkat Jabar," ujarnya.

Menurutnya, kemenangan tersebut bukan sekadar raih juara, melainkan simbol kuatnya komitmen masyarakat Ciamis dalam menjaga budaya daerah di tengah perkembangan zaman. "Budaya adalah jati diri. Ketika budaya terus dijaga dan ditampilkan dengan penuh kecintaan, maka daerah akan memiliki kekuatan karakter yang luar biasa. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus mencintai dan melestarikan budaya Sunda," ujar Hj Kania.

Ditegaskannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama TP PKK akan terus mendukung berbagai kegiatan seni dan budaya sebagai bagian dari penguatan karakter masyarakat, identitas daerah, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Ajang final "Puspa Swara Wanoja Sunda" sendiri mempertemukan 10 finalis terbaik hasil seleksi dari total 63 tim peserta yang berasal dari unsur PKK, PGRI, Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari se-Jabar.

Adapun 10 besar finalis yang tampil pada babak final di Bale Gede Pakuan yakni PGRI Kota Bandung, Persit Kota Bogor, PKK Kabupaten Pangandaran, PKK Kota Banjar, PKK Kabupaten Cianjur, PGRI Kabupaten Purwakarta, PGRI Kabupaten Ciamis, PGRI Kabupaten Bandung, Bhayangkari Kabupaten Garut dan PKK Kota Bandung.

Prestasi ini sekaligus mempertegas bahwa Kabupaten Ciamis tidak hanya fokus pada pembangunan daerah, namun juga konsisten hadir sebagai daerah yang aktif menjaga, mengembangkan dan mengharumkan seni budaya lokal hingga tingkat Provinsi Jabar. (Mamay)

KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN CIPUTAT
KOTA TANGERANG SELATAN

Mengucapkan
**Selamat Hari Raya
Idul Adha**
1447 H / 2026 M

Semoga semangat berqurban
menumbuhkan keikhlasan, kebersamaan,
dan kepedulian kepada sesama.

“
Taqabballah
minna wa minkum
Shiyamana wa shiyamakum
Mohon maaf lahir dan batin

Camat, Kecamatan Ciputat
Mamat, SE, MM

Pagu Anggaran Peningkatan Ruas Jalan Menuju Standar Parengan-Lakardowo Jetis Capai 4,5 M

Mojokerto, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan tajinya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan yang selalu menjadi skala prioritas, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang menjadi nahkoda dalam melaksanakan beberapa proyek strategis ditahun anggaran 2026.

Proyek strategis yang mulai dikerjakan pada awal tahun anggaran 2026 tersebut digelontorkan anggaran yang sangat fantastis hingga mencapai nilai Rp 15 miliar yang terbagi menjadi 4 ruas jalan yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Diantara empat proyek strategis yang menjadi skala prioritas Pemkab Mojokerto tersebut adalah, peningkatan ruas jalan menuju standar atau pelebaran pada ruas Parengan-Lakardowo, Kecamatan Jetis yang pagu anggarannya mencapai 4,6 miliar dengan volume yang dikerjakan mencapai 983 meter lebar 5 hingga 5,5 meter dengan dominasi material menggunakan cor atau rabat beton, proyek yang pengerjaannya sesuai dengan kontrak dikerjakan oleh CV Insan Makmur tersebut dijadwalkan akan rampung pada tanggal 24 Juni 2026 terhitung selama 150 hari kalender sesuai pada surat penandatanganan kon-



Proyek peningkatan Jalan Pagrerang Lakrdowo. (foto:ad)

trak yang telah ditentukan dengan proses pengerjaannya dimulai sejak tanggal 26 Januari 2026.

Yuni Laili Faizah, Kepala Dinas PUPR yang diminta keterangan melalui Kepala Bidang Bina

Marga Henri Surya, menuturkan bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek ini adalah merupakan suatu paket strategis daerah yang dalam proses pengerjaannya harus dijalankan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Untuk itu, bagi seluruh rekanan diwajibkan mematuhi prinsip 5T yaitu, tepat waktu, tepat mutu, tepat volume dan tepat sasaran serta tertib administrasi, bahkan untuk aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja juga menjadi perhatian yang utama," tuturnya.

Lebih lanjut, Henri Surya menambahkan dan mewanti-wanti agar dalam seluruh proses pengerjaannya selalu mengacu pada per-

aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami menekankan agar kiranya para penyedia jasa dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan seperti proses administrasi hingga pelaksanaan fisik harus sesuai dengan aturan yang ada, bahkan material yang digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut harus berasal dari sumber yang legal dan juga memenuhi standar perundang-undangan, karena penggunaan material dari sumber yang tidak jelas atau ilegal itu bisa menimbulkan persoalan hukum kelak dikemudian hari, maka dari itu sejak awal kami ingatkan kepada semua rekanan," pungkasnya.(Ad)

Melalui Program Kencleng UPZ-Baznas Kelurahan Ciamis Sulap Receh Menjadi Berkah

Ciamis, Jaya Pos

Di tengah tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang kian nyata, secercah harapan justru muncul dari gerakan Kencleng UPZ-Baznas di Kelurahan Ciamis.

Melalui program Gerakan Kencleng UPZ-Baznas Kelurahan Ciamis berhasil mengubah receh menjadi berkah, menghimpun hampir Rp. 20 juta setiap bulannya.

Diluncurkan pada Januari 2026, Gerakan Kencleng mengajak warga kelurahan untuk menabung sedekah receh secara rutin di kotak celengan yang disediakan UPZ-Baznas Kelurahan Ciamis. Koin dan lembaran kecil seratus hingga dua ribuan rupiah. Namun dari uang receh inilah, terkumpul angka yang mengejutkan.

Menarik, capaian luar biasa ini baru berjalan terhitung Januari 2026. "Dari dana yang terkumpul, alhamdulillah UPZ-Baznas Kelurahan Ciamis sudah menyalurkan bantuan sebanyak 5 unit rutilahu kepada warga terdampak. Sisanya yang 50% untuk empat program Baznas Ciamis. Diantaranya Ciamis Sehat, Ciamis Cerdas, Ciamis Agamis dan Ciamis Sejahtera.

Hal tersebut diungkapkan Ketua UPZ Kelurahan Ciamis Ade Nurdin melalui bendahara UPZ Anen Suhendi di ruangannya, Rabu (20/5). Menurutnya, dana yang terkumpul dari program Kencleng tidak dibelanjakan mengendap. UPZ Kelurahan Ciamis telah merancang lima program prioritas untuk me-



Perwakilan Baznas Ciamis Dadan serahkan bantuan rutilahu kepada Lurah Ciamis Muhlaso untuk diberikan kepada Rahmat Rudiyo. (Foto:Mamay)

nyalurkan dana secara tepat sasaran dan transparan. "Lima program tersebut meliputi Ciamis Peduli yaitu merenovasi dan membangun rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera. Ciamis Cerdas yaitu memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Ciamis Sehat dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dhuaifa, Ciamis Sejahtera yang

memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM lokal serta Ciamis Agamis dengan cara penyaluran insentif untuk guru ngaji, marbot masjid, dan para penggerak dakwah di desa-desa, "ungkap Anen.

Kelima program tersebut, kata Anen, dijalankan bersama perangkat kelurahan setempat untuk memastikan distribusi bantuan tetap menyentuh kebutuhan riil masyarakat. "Gerakan Kencleng bukan hanya

soal pengumpulan dana, melainkan cerminan dari gotong royong dan kekuatan kolektif masyarakat desa. UPZ Kelurahan Ciamis membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari tangan-tangan masyarakat biasa," katanya.

Diakuinya, konsepnya sederhana ribuan kencleng kecil disebarkan ke rumah-rumah di Kelurahan Ciamis. "Setiap keluarga secara sukarela

mengisi celengan itu dari uang kembalian belanja, sisa uang jajan, atau pendapatan harian. Setiap tanggal 20 hingga akhir bulan, ketua RT mengumpulkan kencleng, menghitung isinya, lalu menyerahkannya ke UPZ-Baznas Kelurahan Ciamis untuk diteruskan ke BAZNAS. Program ini bukan sekadar strategi penggalangan dana, tapi juga sarana pendidikan nilai sedekah sejak dini," pungkasan Anen. (Mamay)

Pemerintah Kecamatan Moncongloe Gelar Kerja Bakti Program Indonesia ASRI

Maros, Jaya Pos

Pemerintah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, melaksanakan kegiatan kerja bakti dalam rangka Program Indonesia ASRI, Selasa (19/05/2026). Kegiatan tersebut dipusatkan di sekitar area kantor Camat Moncongloe dan melibatkan seluruh unsur pemerintahan kecamatan.

Kerja bakti ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Bupati Maros mengenai pelaksanaan kerja bakti rutin, sekaligus bagian dari konsolidasi dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI yang meni-



Kerja bakti di area kantor camat. (foto: ist)

tikberatkan pada pembenahan lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan diikuti oleh seluruh staf Kecamatan Moncongloe, personel Satpol PP, serta petugas Damkar Kecamatan Moncongloe. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan kantor dan area sekitarnya guna menciptakan suasana yang bersih, nyaman, dan sehat.

Pemerintah Kecamatan Moncongloe menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembenahan lingkungan yang diinisiasi

pemerintah daerah melalui pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di tingkat kecamatan.

Selain itu, pihak kecamatan berharap kegiatan kerja bakti seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas kesehatan bersama.(Hk)

Pemko Binjai Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Adha 1447 H

Binjai, Jaya Pos

Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Asrama Kodim 0203/Langkat, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, bersama Ketua TP

PKK Kota Binjai, Nurhayati Amir Hamzah meninjau langsung pelaksanaan kegiatan yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Dalam gerakan pangan murah tersebut, sejumlah komoditas dijual dibawah harga pasar, di antaranya telur Rp48 ribu per papan, Minyak Kita Rp31 ribu per dua liter, serta beras SPHP Rp59 ribu per lima kilogram. Kehadiran pasar murah ini disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan untuk



Wali Kota Binjai tinjau gelaran pangan murah di Asrama Kodim 0203/Langkat, Kamis (21/5/2026). (foto: Diskominfo)

membeli kebutuhan pokok menjelang Iduladha.

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Binjai

dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Selain membantu meringankan beban masyarakat, program tersebut juga diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Camat Binjai Utara, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Binjai, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, perwakilan Kejaksaan, pimpinan OPD, anggota TP PKK, serta tamu undangan lainnya. (Fatimah)

TP PKK Binjai Matangkan Persiapan Lomba Tertib Administrasi 2026



Rapat persiapan monitoring lomba Tertib Administrasi TP PKK di Aula Pemko Binjai, Kamis (21/5/2026). (Foto: Diskominfo Binjai)

Binjai, Jaya Pos

Tim Penggerak PKK Kota Binjai menggelar rapat persiapan monitoring Tertib Administrasi TP PKK di Aula Pemko Binjai, Kamis (21/5/2026), guna memantapkan kesiapan menghadapi lomba yang akan berlangsung Juni 2026 mendatang.

Rapat dipimpin Ketua TP PKK Kota Binjai, Ny. Nurhayati Amir Hamzah, didampingi Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak dan dihadiri pimpinan OPD, camat, lurah se-Kota Binjai.

Dalam rapat tersebut, Ketua TP PKK menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dan kesiapan lokasi lomba, termasuk usulan pelaksanaan kegiatan di ruang terbuka agar tim monitoring dapat langsung meninjau lokasi penilaian.

Secda Kota Binjai meminta seluruh OPD dan pihak kecamatan memperkuat koordinasi serta mempercepat pembenahan kantor camat dan kelurahan, termasuk fasilitas umum pendukung lomba.

Selain itu, Diskominfo Kota Binjai menyatakan kesiapan mendukung dokumentasi dan publikasi kegiatan, sementara TP PKK juga mendorong pemanfaatan barang daur ulang sebagai dekorasi lokasi perlombaan.

(Fatimah)

Pelayanan Si Jempol di Desa Keramat Disambut Antusias Warga



Sarmin Staf Desa Keramat Kecamatan Pakuhaji. (foto: abd)

Tangerang, Jaya Pos

Program pelayanan "Si Jempol" yang digelar di Desa Keramat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, berlangsung lancar, tertib dan kondusif. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara cepat dan langsung.

Sarmin selaku staf Desa Keramat Kecamatan Pakuhaji, mengatakan bahwa kehadiran pelayanan Si Jempol sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang jauh ke kantor pelayanan.

"Alhamdulillah masyarakat bisa terlayani dengan baik. Antusiasme warga juga cukup tinggi karena pelayanan ini sangat membantu kebutuhan administrasi kependudukan," ujarnya saat ditemui media.

Ia menambahkan, pelayanan tersebut terlaksana berkat sinergi antara pihak kecamatan dengan Disdukcapil, sehingga proses pelayanan berjalan tertib, efektif, dan maksimal.

Warga berharap program jemput bola seperti Si Jempol dapat terus dilaksanakan secara rutin agar pelayanan publik semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Sementara H Nur Alam, Kepala Desa Keramat sangat mendukung sekali dengan program Si Jempol ini. "Terima kasih kepada Bupati Tangerang Drs H Moch Maeslyal Rasyid MSI," ujarnya mengakhiri.(Abd)

Agus Hero Planeto: Proyek PL Dinas PUPR Belitung Dikerjakan Sesuai SOP dan Profesional

Belitung, Jaya Pos

Pemilik CV Planet Mulia Persada, Agus Hero Planeto, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan proyek Penunjukan Langsung (PL) yang diperoleh perusahaannya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Belitung dikerjakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), kontrak kerja, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Menurut Agus Hero, paket pekerjaan yang diperoleh perusahaannya didapat melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk proses registrasi perusahaan, evaluasi kualifikasi, hingga penilaian melalui sistem LPSE. Ia menekankan bahwa CV Planet Mulia Persada tidak masuk dalam daftar hitam (blacklist) sehingga memenuhi syarat untuk mengikuti proses penunjukan langsung proyek bernilai di bawah Rp200 juta.

"Semua pekerjaan kami jalankan sesuai aturan. Paket proyek yang diperoleh merupakan hasil penilaian kualifikasi perusahaan secara profesional dan proporsional. Tidak ada unsur KKN ataupun kedekatan dengan pihak tertentu," tegas Agus Hero kepada Jayapos, Kamis (21/05).

Ia menjelaskan, setiap perusahaan jasa konstruksi memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, kemampuan teknis, serta kesiapan finansial perusahaan.

Agus juga membantah berbagai isu dan pemberitaan yang menyebut adanya permainan atau intervensi dalam perolehan sejumlah paket PL yang diterima perusahaannya. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung menyudutkan CV Planet Mulia Persada.

"Informasi yang menyebut ada permainan atau campur tangan pihak tertentu itu tidak benar. Saya bekerja di bidang jasa konstruksi sudah lama dan mendapatkan pekerjaan melalui mekanisme yang berlaku. Tidak ada meminta-minta proyek ataupun mengandalkan kedekatan dengan pejabat," ujarnya.

▶▶Halaman 11



Kantor Dinas PUPR Belitung (foto : dok)

Bupati Sukabumi Hadiri Peringatan Hari Nelayan Palabuhanratu Ke 66

Sukabumi, Jaya Pos

Ribu-an warga memadati Alun-alun Gadobangkong Palabuhanratu, dalam puncak peringatan Hari Nelayan Palabuhanratu ke-66, Kamis (21/5/2026). Tradisi tahunan masyarakat pe-



Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas. (Foto: Ist)

▶▶Halaman 11

Jelang Idul Adha, Pemkab Simalungun Gelar GPM di Kecamatan Bandar

Simalungun, Jaya Pos

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat melalui



Jelang perayaan Idul Adha 1447 H Pemkab Simalungun gelar kegiatan GPM. (Foto : ist)

▶▶Halaman 11

Danrem 022/PT Hadiri Upacara Penutupan TMMD ke-128 TA 2026

Langkat, Jaya Pos

Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Sandi Kamidiyanto SIP MIP menghadiri Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun Anggaran (TA)



Penutupan TMMD ke 128 tahun 2026. (foto:ist)

▶▶Halaman 11

Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto SIK Gelar Ramah Tamah dan Coffee Morning Bersama PWI Way Kanan

Way Kanan, Jaya Pos

Polres Way Kanan menggelar kegiatan ramah tamah dan coffee morning bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Way Kanan pada Rabu, (20/05/2026). Acara yang berlangsung di Balai Wartawan Yo'el Lukasim Sekretariat PWI Way Kanan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.



Kapolres Way Kanan ramah tamah di Gedung PWI Way Kanan. (foto:ist)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto SIK didampingi Wakapolres, Kabag Op dan Kasat Lantas yang dihadiri Ketua PWI Way Kanan Rico Anggara SH MKn, Sekretaris Candra Putra Wijaya ST, Bendahara Yasir Subagio serta puluhan anggota PWI Way Kanan.

Dalam sambutannya, Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto mengungkap

apresiasi kepada para wartawan PWI Way Kanan yang selama ini telah mendukung Polres Way Kanan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Kami berharap kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus ditingkatkan. Kehadiran rekan-rekan wartawan sangat membantu kami dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada

masyarakat, sehingga dapat mencegah penyebaran berita hoaks," ujar Kapolres AKBP Didik.

Sementara itu, Ketua PWI Way Kanan Rico Anggara menyampaikan rasa terima kasih atas inisiatif Polres Way Kanan mengadakan kegiatan ramah tamah dan coffee morning. Menurutnya, acara seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang harmonis antara Polri dan media.

▶▶Halaman 11

Wakil Bupati Katamso Buka Rapat Timpora Dorong Pengawasan Keimigrasian yang Terpadu

Kualatungkal, Jaya Pos

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri sekaligus membuka Rapat Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Melalui Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) guna mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di Pola



Wabup Katamso saat menyampaikan kata sambutan di acara timpora. (Foto:Kominfo)

Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Rabu (20/05/26).

Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam sambutannya,

▶▶Halaman 11

MAN 1 Darussalam Ciamis Lakukan Studi Tiru ke MAN 4 Jakarta

Ciamis, Jaya Pos

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pengembangan program unggulan, MAN 1 Darussalam Ciamis melaksanakan kunjungan Studi Komparatif (Studi Tiru) ke MAN 4 Jakarta Selatan, Senin (18/5). Kegiatan ini menjadi langkah strategis madrasah dalam menyerap berbagai praktik baik (best practices) demi mendorong mutu kelembagaan se-

cara berkelanjutan.

Kedatangan rombongan dari MAN 1 Darussalam Ciamis disambut dengan hangat oleh Kepala MAN 4 Jakarta Selatan Widyo Prayoga MPd beserta Kepala Tata Usaha dan jajaran pimpinan madrasah. Pertemuan yang berlangsung di ruang meeting tersebut berjalan dalam suasana kekeluargaan namun tetap formal



Kepala MAN 1 Darussalam Ciamis H Dayat studi komparatif ke MAN 4 Jakarta. (Foto:Mamay)

▶▶Halaman 11

Penangguhan Penyerahan SPT Korwil Pendidikan Garut Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Sikap Bupati

Garut, Jaya Pos

Penangguhan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada 42 calon Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada Kamis (21/5/2026) memicu tanda tanya besar di tengah publik dan kalangan aparat sipil negara (ASN). Agenda yang sebelumnya dijad-

walkan berlangsung di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut itu semula akan dihadiri langsung oleh Bupati Garut. Namun hingga acara berlangsung, Bupati tidak kunjung hadir sehingga penyerahan SPT kepada para calon Korwil akhirnya ditangguhkan.

Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan pertan-

yaan publik. Pasalnya, sebelumnya Bupati Garut diketahui pernah memberhentikan seluruh Korwil Pendidikan. Kini, muncul rencana pengaktifan kembali jabatan tersebut tanpa adanya penjelasan resmi terkait hasil evaluasi yang pernah dilakukan pemerintah daerah.

Kondisi ini juga menuai respons dari kalangan ASN di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sejumlah kepala sekolah dan guru mempertanyakan urgensi pengaktifan kembali Korwil, mengingat selama ini sistem koordinasi dinilai masih dapat berjalan melalui pengawasan sekolah, Koordinator Pengawas (Korwas), Kelompok Kerja Kepala

▶▶Halaman 11



Kepala dinas pendidikan dan calon korwil usai gagal penyerahan SPT. (Photo:Hartono)

Dukung Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional Polres Ciamis Gelar Panen Raya Jagung Serentak



Kapolres Ciamis AKBP H Hidayatullah bersama Dandim 0613 Letkol Inf Antonius Ari Widiono pada kegiatan panen raya jagung serentak Kuartal II tahun 2026 di Desa Sukamulya. (Foto: Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang swasembada dan ketahanan pangan nasional, Polres Ciamis melaksanakan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Desa Sukamulya, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Kapolri dan Presiden Republik Indonesia serta berlangsung dengan aman, tertib dan penuh antusiasme dari seluruh peserta yang hadir, Sabtu (16/5).

Kegiatan panen raya dilaksanakan mulai pukul 14.30 hingga pukul 15.15 Wib, bertempat di Dusun Cariang RT 02 RW 05 Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP H Hidayatullah SH SIK MSi, sebagai bentuk dukungan nyata Polri terhadap penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0613 Ciamis Letkol Inf Antonius Ari Widiono SSos MHum, Wakapolres, Kepala Dinas Pertanian, para Pejabat Utama Polres, Kapolsek Ciamis, Danramil, para perwira Polres, Camat Ciamis, Kepala Desa Sukamulya serta para tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pembacaan doa, dilanjutkan sambutan Kapolri dan Presiden Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan kemudian diteruskan dengan sambutan Kapolres Ciamis, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis dan panen jagung secara simbolis di lahan pertanian seluas dua hektare yang berada di wilayah Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg.

Dalam arahnya, Kapolri menegaskan bahwa kegiatan panen raya jagung tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendukung swasembada pangan, khususnya komoditas jagung. Kegiatan tersebut juga menjadi ujung tombak dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebuah bangsa tidak akan benar-benar merdeka apabila belum mampu memproduksi pangannya sendiri. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Polri dan para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan panen raya jagung tersebut menjadi salah satu bentuk sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, TNI dan masyarakat dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Kerja sama yang dilakukan bersama Pemerintahan Dusun Cariang Desa Sukamulya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Kapolres Ciamis AKBP H Hidayatullah SH SIK MSi menyampaikan bahwa Polres Ciamis siap mendukung penuh program ketahanan pangan nasional melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan kelompok tani. Kehadiran Polri dalam sektor pertanian merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus upaya mendukung terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Selain menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polres Ciamis juga berkomitmen untuk terus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, TNI dan masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Masyarakat dan para petani di Desa Sukamulya menyambut baik kegiatan panen raya jagung serentak tersebut. Kehadiran jajaran Polri bersama pemerintah daerah dinilai memberikan motivasi dan dukungan positif bagi para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. (Mamay)

Bupati Simalungun Ajak Semua Pihak Jaga Keamanan dan Ketertiban



Kadisdik Simalungun hadir di acara jaga keamanan dan ketertiban. (foto ist)

Simalungun, Jaya Pos

Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kekompakan dan sinergi demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Bupati Simalungun saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda), Selasa (19/05/2026), di Aula Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Sumatera Utara.

“Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh unsur Forkopimda yang telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun

2026,” ucap bupati.

Menurut Bupati, berkat kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pihak terkait, pelaksanaan pengamanan selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan aman, kondusif, dan lancar di wilayah Kabupaten Simalungun.

Bupati juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Simalungun.

“Saya berharap hubungan baik yang selama ini terjalin dapat semakin erat, tetap kompak, solid, dan terus berjuang dengan semangat baru

untuk mewujudkan Simalungun maju,” ujar bupati.

Bupati juga menyoroti tentang kondusifitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Bupati menegaskan bahwa Kamtibmas merupakan kunci sukses pembangunan daerah.

“Mari kita semua untuk terus bekerja sesuai fungsi masing-masing agar sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan optimal di Kabupaten Simalungun, Tanoh Habonaron Do Bona yang dicintai bersama,” ajak bupati dengan penuh semangat.

Forkopimda merupakan rumah besar bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Pertemuan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama da-

lam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Simalungun.

“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Forkopimda adalah kunci keberhasilan dalam menjaga kondusifitas daerah. Semoga sinergitas kita bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Simalungun senantiasa diberikan kelancaran dan hasil yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa,” pungkask bupati.

Dalam rakor tersebut turut dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya penanganan banjir dan longsor, penanggulangan sampah secara komprehensif, optimalisasi ketahanan pangan, serta penguatan situ-

asi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tampak hadir dalam forum tersebut antara lain Ketua DPRD Simalungun Sugianto, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Mixnon Andreas Simamora, para pimpinan perangkat daerah termasuk Camat se Kabupaten Simalungun dan undangan lainnya.

Kegiatan berlangsung tertib dan penuh khidmat, diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa oleh M Yarpipi, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eka Candra Barus.

(RD)

RSUD La’ Palaloi Bahas Program BPJS Kelas Rawat Inap Standar

Maros, Jaya Pos

RSUD La’ Palaloi menggelar rapat bidang pelayanan yang membahas program BPJS Kesehatan terkait penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)P di rumah sakit. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat RSUD La’ Palaloi, Kamis (21/05/2026).

Rapat ini melibatkan berbagai unsur pelayanan rumah sakit, di antaranya Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kasi Pelayanan Medik, Kasi Pelayanan Keperawatan, kepala ruangan rawat inap, ke-



Rapat bidang pelayanan program BPJS. (foto:ist)

pala ruangan rawat jalan, serta Pasien (MPP). Komite Manajer Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan

Keperawatan Agus Sujadi Skep Ns mengatakan bahwa pembahasan dalam rapat difokuskan pada kesiapan pelayanan rumah sakit dalam mendukung program BPJS, khususnya penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar yang kini menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan nasional.

Selain itu, rapat juga membahas pelayanan BPJS secara online guna meningkatkan efektivitas dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

Seluruh kegiatan rapat

dilaksanakan atas arahan Direktur RSUD La’ Palaloi dr Sri Syamsinar Rachmah SKed sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pihak rumah sakit berharap seluruh unit pelayanan dapat memahami dan menjalankan kebijakan terbaru BPJS secara optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik, cepat, dan terstandar.

(Hk)

Pemkab Maros Laksanakan Program Kolaboratif Bertajuk “PKK Goes To School”

Maros, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros melaksanakan program kolaboratif bertajuk “PKK Goes To School” di Kecamatan Moncongloe, baru-baru ini.

Program ini secara resmi digelar di dua sekolah, yakni SMA Negeri 14 Maros dan SMP Negeri 6 Moncongloe.

Kegiatan “PKK Goes To School” dihadiri oleh Sekretaris TP PKK Kabupaten Maros bersama Ketua Pokja 1 hingga Pokja 4 dan pengurus TP PKK Kabupaten Maros. Hadir pula Ketua TP PKK Kecamatan Moncongloe beserta

anggota PKK se-Kecamatan Moncongloe, Ketua TP PKK Desa, staf Puskesmas Moncongloe, Koordinator PLKB, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf pengajar, serta puluhan siswi dari sekolah tempat pelaksanaan kegiatan.

Program PKK Goes To School dilaksanakan sebagai upaya sosialisasi berbagai program kerja dari masing-masing Pokja TP PKK.

Pokja 1 mensosialisasikan program KIAM (Keluarga Indonesia Anti Trafficking), Pokja 2 memperkenalkan program Gemar Membaca, Pokja 3 memberikan edukasi mengenai pola makan sehat mel-

alui program “Isi Piringku”, sedangkan Pokja 4 menyosialisasikan pentingnya pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan generasi muda yang sehat, ceria, dan berprestasi.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini, sehingga para remaja putri kelak dapat menjadi calon ibu yang sehat dan mampu melahirkan generasi

yang berkualitas.

Melalui program PKK Goes To School di SMA Negeri 14 Maros dan SMP Negeri 6 Moncongloe, TP PKK Kabupaten Maros berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik dalam menanamkan nilai-nilai penting bagi tumbuh kembang anak-anak dan remaja. Program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, sehat, serta berkarakter.

Kegiatan berlangsung dengan antusias dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para peserta yang mengikuti rangkaian sosialisasi tersebut. (Hk)



PKK punya program Goes To School. (foto:ist)

Polsek Lau Gelar Patroli Sambang dan Baksos “Passapeda Bhabinkamtibmas Berbagi”



Jajaran Polsek Lau berbagi. (foto: ist)

Maros, Jaya Pos

Dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial, jajaran Polsek Lau melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Passapeda (Pasukan Sepeda) Bhabinkamtibmas Berbagi di wilayah hukum Polsek Lau, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 Wita tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Lau AKP Syamsir SH bersama personel polsek dengan melakukan patroli sambang menggunakan sepeda ke sejumlah wilayah binaan masyarakat.

Program Passapeda Bhabinkamtibmas Berbagi merupakan inovasi sosial yang diprakarsai oleh Kapolsek Lau sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Melalui patroli bersepeda, personel Bhabinkamtibmas menyapa warga sekaligus menyoroti lokasi-lokasi yang selama ini belum banyak terjangkau interaksi langsung dengan pihak kepolisian.

Selain melaksanakan patroli sambang, personel Polsek Lau juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga kurang mampu di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Lau.

Dalam kesempatan tersebut, personel Polsek Lau turut menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial antarwarga, serta terus mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

Kapolsek Lau AKP Syamsir SH mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polsek Lau untuk hadir lebih dekat di tengah masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan penuh kepedulian.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Kami ingin kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar serta mendapat respons positif dari masyarakat atas kepedulian Polsek Lau melalui program Passapeda Bhabinkamtibmas Berbagi. (Hk)

Bara Hati Temui Kapolres Pematangsiantar Bahas Keamanan Masa Depan Generasi Muda

Pematangsiantar, Jaya Pos

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Hati Indonesia melaksanakan audiensi dengan Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitingjak SH SIK MH, pada Selasa (19/05/2026) pukul 15.00 WIB di ruang kerja Kapolres Pematangsiantar.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitingjak didampingi Kasat Intelkam AKP Hary Isdyanto SH MH.

Sementara dari pihak DPP Bara Hati Indonesia hadir Ketua Umum Rikkot Damanik, Sekretaris Umum Hunter D Samosir, Bendahara Umum Ricardo Lumbanraja, serta Koordinator Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Bobby Sihite.

Dalam pertemuan tersebut, DPP Bara Hati Indonesia menyampaikan dukungan terhadap kinerja Polres Pematangsiantar di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Sitingjak dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah.

Ketua Umum DPP Bara Hati Indonesia Rikkot Damanik, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan AKBP Sah Udur Sitingjak, Kota Pematangsiantar dinilai semakin kondusif dan kehidupan demokrasi berjalan dengan baik.

“Kami melihat situasi Kota Pematangsiantar semakin kondusif. Stabilitas keamanan terjaga dan ruang demokrasi berjalan baik. Ini harus dijaga bersama oleh



(Dari kiri ke kanan) Sekjen Bara Hati Indonesia, Ketum, Bidang Organisasi, Kapolres Pematangsiantar, Bendahara Umum, Kasat Intel Polres Pematangsiantar

seluruh elemen masyarakat,” ujar Rikkot Damanik.

Sementara Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Sitingjak menyampaikan apresiasi terhadap sikap Bara Hati Indonesia yang ikut mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif di Kota Pematangsiantar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan narkoba. “Walaupun bandar besar narkoba belum berhasil kami temukan, tetapi kami tidak pernah berhenti sam-

pai di situ. Kritik masyarakat kami pahami sebagai bentuk kepedulian dan motivasi agar kami bekerja lebih profesional. Percayalah, kami akan terus berusaha menembus jaringan bandar besar narkoba di Kota Pematangsiantar dengan dukungan masyarakat luas, termasuk Bara Hati Indonesia,” tegas AKBP Sah Udur Sitingjak.

Dalam sesi diskusi, Sekretaris Umum DPP Bara Hati Indonesia Hunter D Samosir mempertanyakan langkah preventif Polres dalam mencegah peredaran narkoba di dunia

pendidikan.

Menjawab hal tersebut, Kapolres menjelaskan pihaknya intens melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

“Saat ini Polres aktif melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah sebagai inspektur upacara, sekaligus memberikan penyuluhan dan bimbingan mengenai bahaya narkoba. Kami juga berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba,” jelasnya.

Di akhir audiensi, keluarga besar DPP Bara Hati Indonesia menyerahkan piagam penghargaan kepada AKBP Sah Udur Sitingjak SH SIK MH, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas komitmen menjaga keamanan daerah dan pemberantasan narkoba.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara Polres Pematangsiantar dan Bara Hati Indonesia dalam menjaga keamanan, stabilitas daerah, dan masa depan generasi muda.

(Hunter Samosir)

Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang Gencar Promosikan Zona Integritas Bebas dari Korupsi



Menakar komitmen integritas di Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, antara poster dan realita.

Deli Serdang, Jaya Pos

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Deli Serdang saat ini tengah gencar mempromosikan gerakan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, (20/5/26). Melalui serangkaian kampanye visual yang dipimpin oleh Dr Dra Hj Miska Gewasari MM ini mengemukakan posisi tegasnya dalam menolak gratifikasi dan menyediakan sistem pelaporan.

Kampanye tersebut dengan jelas mengurai janji-janji integritas, mulai dari ajakan Say No to Gratifikasi hingga penyediaan kanal laporan pengaduan di nomor 0811 6147 773. Pihak dinas menekankan bahwa setiap laporan yang masuk akan dijamin kerahasiaan identitas pelapornya demi menjaga kinerja yang bersih dan pelayanan prima.

Namun, bagi masyarakat, poster dan slogan tersebut hanyalah langkah awal. Kredibilitas sebuah instansi tidak diukur dari estetika spanduk kampanye, melainkan dari konsistensi tindakan di lapangan. Publik kini menanti pembuktian nyata dari komitmen tersebut.

Transparansi dan Peran Masyarakat

Dalam prinsip birokrasi modern, integritas bukan sekadar jargon, melainkan kontrak sosial antara pemberi layanan dan masyarakat. Langkah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Dr Dra Hj Miska Gewasari MM dalam membuka ruang bagi whistleblowing merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah.

Keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan jika ditemukan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi komitmen dinas tersebut. Apakah kanal pengaduan yang disediakan benar-benar responsif dan mampu menindaklanjuti setiap temuan, atau hanya menjadi formalitas administratif?

Publik di Deli Serdang tentu berharap bahwa komitmen jujur, bersih, dan melayani bukan hanya menjadi dekorasi kantor, melainkan budaya kerja yang mendarah daging di bawah kepemimpinan saat ini. Pengawasan publik akan terus berjalan, memastikan bahwa setiap janji yang tertulis di poster-poster tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata demi pelayanan publik yang lebih bermartabat. (Rd)

Dorong Ekonomi Lokal dan Kemandirian Desa Bupati Ciamis Resmikan Koperasi Desa Merah Putih

Ciamis, Jaya Pos

Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menghadiri peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digelar di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti, Sabtu (16/05). Peresmian tersebut dilaksanakan secara serentak secara nasional melalui virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan bahwa program KDMP merupakan salah satu program prioritas Presiden yang memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, program tersebut akan membawa dampak be-



Bupati Herdiat Sunarya hadir peresmian KDMP di Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti. (Foto:Mamay)

sar bagi kesejahteraan masyarakat. “Kalau betul-betul dimaksimalkan dan diresapi dengan sebaik-baiknya, ini merupakan program yang sangat mulia dan luar biasa,” ujar Herdiat.

Dijelaskannya, pembangunan KDMP di Kabupaten

Ciamis saat ini terus berjalan di 265 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 KDMP telah mulai dilaksanakan dan 49 gedung di antaranya telah selesai dibangun. Sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian.

Adapun sekitar 65 desa lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian lahan yang dinilai strategis untuk pembangunan koperasi desa tersebut.

Bupati Ciamis menegaskan, keberadaan KDMP harus benar-benar diniatkan untuk membantu masyarakat desa, khususnya dalam memperkuat perputaran ekonomi lokal agar tidak terlalu banyak uang yang keluar ke daerah lain.

Menurutnya, peluang besar juga hadir melalui program MBG yang saat ini membutuhkan banyak bahan baku pangan. Namun, sebagian kebutuhan tersebut masih dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum sepenuhnya mencukupi. “Kalau potensi lokal seperti beras, sayur, daging hingga telur bisa dimanfaatkan secara maksimal, ini

akan sangat luar biasa dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis,” ujar Herdiat.

Diungkapkan, untuk kebutuhan beras saat ini sudah mampu dipenuhi dari produksi lokal Ciamis. Namun untuk komoditas sayuran, sekitar 30 hingga 40 persen masih didatangkan dari luar daerah.

Di akhir sambutannya, Herdiat berpesan kepada seluruh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar menjalankan amanah dengan niat baik, penuh integritas dan mengedepankan pengelolaan yang akuntabel. “Koperasi bukan sekadar urusan administratif semata, tetapi bagaimana membangun tata kelola koperasi yang transparan dan partisipatif,” pungkasnya.

(Mamay)

Lewat Implementasi 6 Bidang SPM Pemkab Ciamis Dorong Posyandu Naik Kelas

Ciamis, Jaya Pos

Kabupaten Ciamis terus memperkuat transformasi pelayanan masyarakat berbasis Posyandu. Tidak lagi hanya identik dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini diarahkan menjadi pusat pelayanan terpadu masyarakat melalui implementasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Komitmen tersebut ditunjukkan saat Ketua TP Posyandu Kabupaten Ciamis Hj Kania Ernawati Herdiat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat secara virtual dari Ruang Vidcon Setda Kabupaten Ciamis, Selasa (19/5).

Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Tim Pembina Posyandu dalam Akselerasi Posyandu Istimewa dengan 6 Bidang SPM di Jawa Barat” itu menjadi momentum penting

dalam memperkuat pembinaan dan pendampingan kelembagaan Posyandu, sekaligus percepatan implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

Kegiatan tersebut turut melibatkan lintas perangkat daerah strategis, mulai dari unsur DPMDes, Bappeda, BPKAD hingga para Ketua Bidang 6 SPM Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jabar.

Ketua TP Posyandu Provinsi Jabar Siska Gerfianti dalam arahnya menegaskan bahwa transformasi posyandu harus mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui implementasi 6 bidang SPM.

Menurutnya, pendataan SPM menjadi fondasi utama dalam melakukan optimalisasi dan revitalisasi posyandu di daerah.

Sementara itu, Kepala



Ketua TP Posyandu Kabupaten Ciamis Hj Kania Ernawati Herdiat ikuti Rakor Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota Provinsi Jabar secara virtual. (Foto:Mamay)

DPMDesa Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi menilai transformasi posyandu bukan hanya penguatan kelembagaan semata, tetapi juga upaya menghidupkan kembali semangat gotong royong yang mulai terkikis.

la menuturkan, implementasi 6 SPM merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah karena menyangkut pelayanan

dasar wajib pemerintah kepada masyarakat.

Ade juga menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan penguatan peran perangkat daerah dalam pembinaan posyandu, termasuk sebagai landasan penyusunan rancangan regulasi terkait pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di Kabupaten Ciamis sendiri, keikutsertaan aktif TP Posyandu dalam forum strategis tingkat provinsi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, responsif dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Ciamis Hj Kania Ernawati Herdiat menilai transformasi posyandu melalui pendekatan 6 SPM menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Melalui penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis posyandu akan semakin berperan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat berbasis gotong-royong di tingkat desa dan kelurahan.

(Mamay)



Terbit Setiap Minggu

Diterbitkan Oleh:

PT. Media Cipta Jaya Selaras

SK MENKUM & HAM RI:

Nomor: AHU-19831.40.10.2014

Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337

NPWP No: 70.947.655.0-001.000

SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:

Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003

Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat

Telp: (021) 23095745

e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id

Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:

Drs. John Hotman Malau, M.Si

Wakil Pemimpin Umum:

Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Pemimpin Perusahaan:
Toni Limbong, SH. Febril Oloan Seim Brande, S.Ak
Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris Redaksi:
Anrico Pasaribu, ST., SH. Jaya Hasni S.
Redaktur Pelaksana: Manager Pemasaran/Iklan:
Pahotan Sinaga Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:

Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu, ST, SH

Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:

A. Ristanto

REDAKTUR:

Dede Rostini

DESAIN GRAFIS/IT:

Agus Wiro

PHOTO GRAPHER

Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Riau:

Rikkot Manik

Sumatera Selatan: Bangka Belitung:

Yustami Al

Jambi: Sumatera Barat:

Kusuma Inrdra Wijaya Zakirman

Banten: Bengkulu:

Guntur Sihombing

DKI Jakarta: Lampung:

Jama Berutu Suhaili

Jawa Tengah: Jawa Barat:

M. Sofi Hendry Hutagalung

Jawa Timur: Sulawesi Selatan:

Wiro Utomo Muh. Hakim

Kalimantan Tengah: Sulawesi Tengah:

Mandau Suwandi Heriyanti

Kalimantan Barat: Kalimantan Timur:

.....

STAF REDAKSI:

JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning |

Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung |

Bedman Tambunan

LITBANG:

Lamser Limbong

SIRKULASI:

Nelson Hutapea

PENASEHAT HUKUM:

Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:

Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.

ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.

Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka

Rek. No. : 1148-01-000156-30-1

a/n PT Media Cipta Jaya Selaras

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot

Rek. No. : 0379-01-002054-50-7

a/n Toni Limbong

- Bank BCA Cab. Daan Mogot

Rek. No. : 1984084008

a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang

Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473

(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Kades Kayu Bongkok H Hamdani 24 Jam Siap Melayani Warga Secara Prima



H Hamdani Kades Kayu Bongkok Kecamatan Sepatan. (foto:abd)

Tangerang, Jaya Pos

Kepala Desa (Kades) Kayu Bongkok Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten, H Hamdani menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengenal waktu.

Saat ditemui awak media, H Hamdani menyampaikan bahwa amanah sebagai kepala desa merupakan bentuk pengabdian yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab

dan keikhlasan.

"Saya bekerja karena Allah SWT. Jabatan ini adalah amanah untuk melayani masyarakat. Insya Allah saya siap melayani warga 24 jam," tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama. H Hamdani ingin memastikan seluruh warga Desa Kayu Bongkok mendapatkan pelayanan cepat, tepat, dan maksimal dalam setiap

kebutuhan administrasi maupun persoalan sosial di lingkungan desa.

Ia juga menekankan pentingnya kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan sejahtera.

Dengan semangat pelayanan prima, Pemerintah Desa Kayu Bongkok diharapkan semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Abd)

Jalan Panimbang Pandeglang Disebut "Jalan Maut", Warga Tuding Debu Batching Plant

Pandeglang, Jaya Pos

Kondisi jalan di Desa Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dikeluhkan warga karena dipenuhi debu tebal dan material diduga berasal dari aktivitas Batching Plant Solodengen milik PT Sadulur Berkah Makmur. Jalan tersebut bahkan disebut warga sebagai "jalan maut" karena kerap membahayakan pengguna.

Seorang warga, Fitria Ningsih, warga Kampung Sukajadi RT 001/RW 003, Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, menjadi korban kecelakaan saat melintasi ruas jalan tersebut. Kecelakaan diduga terjadi akibat jalan licin dan tertutup debu serta kerikil yang berserakan.

Usai kejadian, korban sempat mendapat perawatan di fasilitas kesehatan terdekat sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Banten karena mengalami luka serius dan harus menjalani tindakan operasi.

Pihak keluarga korban berharap adanya tanggung jawab dari PT Sadulur Berkah Makmur, termasuk santunan untuk membantu biaya pengobatan. Namun, keluarga menyebut bantuan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan perawatan korban yang cukup berat.

Warga sekitar mengatakan jalan tersebut setiap hari dilalui ratusan kendaraan. Debu, lumpur, dan material yang diduga berasal dari aktivitas batching plant disebut kerap membuat pengendara kehilangan kendali.

"Sudah sering terjadi kecelakaan di sini, terutama saat jalan penuh debu dan batu kecil," ujar salah satu warga.

Warga juga menilai kondisi semakin



Foto Ilustrasi

berbahaya saat aktivitas pabrik sedang berlangsung. Mereka meminta perusahaan lebih serius menjaga keselamatan pengguna jalan dan tidak mengabaikan dampak aktivitas operasional.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Sadulur Berkah Makmur, Candra, menyebut pihaknya telah rutin melakukan pembersihan jalan.

"Setiap hari kami lakukan pembersihan minimal dua kali, dan setelah operasional juga kami bersihkan kem-

bali," ujarnya.

Namun, pihak perusahaan menegaskan tidak dapat sepenuhnya menjamin kondisi jalan, karena ruas tersebut merupakan jalan umum yang digunakan berbagai jenis kendaraan dengan kondisi dan perilaku pengendara yang berbeda-beda.

Meski demikian, keluhan warga masih terus bermunculan karena debu dan material bangunan dinilai masih sering menumpuk di badan jalan dan

meningkatkan risiko kecelakaan.

Secara hukum, apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan, perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pidana, denda, hingga kewajiban ganti rugi kepada korban. (Yan)

952 Jemaah Haji Asal Pandeglang Telah Diberangkatkan

Pandeglang, Jaya Pos

Sebanyak 952 jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang telah resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Kloter terakhir yang diberangkatkan adalah kloter 23 dengan jumlah 173 jemaah, dilepas langsung oleh Bupati Pandeglang di Pendopo, Minggu (17/5/2026).

Sebelumnya, dalam dua pekan terakhir, Pemkab Pandeglang telah memberangkatkan kloter 13 sebanyak 388 jemaah dan kloter 17 sebanyak 391 jemaah. Seluruh proses pemberangkatan dilakukan oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, mulai dari Pendopo hingga menuju Asrama Haji Cipondoh.

Bupati Pandeglang Raden



Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani Bersama Kepala Kementerian Haji Pandeglang (Foto: Ist)

Dewi Setiani menyampaikan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, ia berpesan agar para jemaah dapat memanfaatkan momentum tersebut

dengan sebaik-baiknya untuk beribadah.

"Tidak semua orang mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Manfaatkan waktu ditanah suci untuk beribadah dengan sung-

guh-sungguh," ujarnya.

Ia juga berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta kekompakan selama menjalankan rangkaian ibadah haji hingga kembali ke tanah air.

"Kita doakan seluruh para jemaah haji yang berangkat ke tanah suci pulang kembali dengan sehat, selamat dan menyandang haji yang mabrur," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, Supardi, menjelaskan bahwa jumlah jemaah pada kloter 23 sebanyak 173 orang, terdiri dari 80 laki-laki, 90 perempuan, serta 2 petugas haji.

"Pada kloter 23 terdapat jemaah termuda atas nama

Lubnan Mahbuby Raja Erlangga (16) dari Kampung Daya Makmur, Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan. Sedangkan jemaah tertua adalah Enah Husaenah (88) dari Kampung Siruang, Desa Caringin, Kecamatan Labuan," terangnya.

Lebih lanjut, Supardi menyampaikan total keseluruhan jemaah haji asal Pandeglang tahun 2026 mencapai 952 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga kloter, yakni kloter 13 sebanyak 388 orang, kloter 17 sebanyak 391 orang, dan kloter 23 sebanyak 173 orang.

"Alhamdulillah seluruh jemaah haji asal Pandeglang tahun ini telah diberangkatkan sesuai jadwal," pungkasnya.

(Yan/Hms)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur:** - | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Peka-longan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Kota Mojokerto /Jombang :** Totok Setyanto (Kepala) | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan:** Wiro Utomo (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Danrem 022/PT Hadiri Upacara..... Halaman 7

2026 di wilayah Kodim 0203/Langkat yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Dusun III Desa Pasarawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Kamis (21/05/2026).

Upacara penutupan TMMD tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa dan berlangsung khidmat serta penuh semangat kebersamaan antara TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB menyampaikan bahwa kemandirian TNI dengan rakyat tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga hubungan TNI dan rakyat merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menguatkan. "Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemandirian TNI

dengan rakyat serta membantu percepatan pembangunan di daerah, kegiatan TMMD ke-128 TA 2026 ini menjadi langkah nyata yang dilaksanakan Kodim 0203/Langkat untuk terus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam berharap, pelaksanaan program TMMD tersebut mampu mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sasaran fisik TMMD ke-128 TA 2026 meliputi pengerasan badan jalan, normalisasi parit, bedah rumah, rehabilitasi mushola, pembuatan plat deker, pembuatan gorong-gorong serta pembangunan sumur bor yang

diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Pasarawa.

"Hal ini tentu menjadi sumbangsih yang sangat berarti bagi percepatan kemajuan masyarakat desa, baik lahir maupun batin. Saya berharap semangat kebersamaan dan gotong royong terus terjalin dengan baik sehingga seluruh program TMMD dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Pangdam I/BB juga menyatakan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Satgas TMMD ke-128 yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan demi membantu masyarakat. "Ingatlah bahwa pengabdian yang diberikan dalam pelaksanaan TMMD ini merupakan bagian dari amal ibadah serta wujud cinta tanah air dan bangsa," tegas Pangdam.

Agus Hero Planeto: Proyek PL Dinas PUPR Halaman 7

La membahas, keberhasilan perusahaannya memperoleh beberapa paket pekerjaan merupakan bagian dari kepercayaan pengguna jasa terhadap kemampuan manajemen perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai kualitas.

"Kalau dulu saya dapat satu atau dua paket pekerjaan itu hal biasa. Tahun ini ada empat paket dari Dinas PUPR. Kalau diberikan pekerjaan dan perusahaan dinilai mampu, tentu kami siap mengerjakannya," katanya.

Agus juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat daerah untuk mendapatkan proyek pemerintah. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta di lapangan.

"Kalau ada yang mengatakan saya mendapatkan proyek karena faktor keluarga atau

intervensi pejabat, itu sama sekali tidak benar. Semua berjalan sesuai mekanisme pengadaan pemerintah," tandasnya.

Lebih lanjut, Agus menilai proses penunjukan langsung di lingkungan pemerintah tetap harus mengedepankan transparansi, kemampuan perusahaan, serta profesionalisme kontraktor. Menurutnya, indikasi praktik KKN tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh kontraktor karena setiap perusahaan memiliki kemampuan dan rekam jejak yang berbeda.

Ia bahkan mempersilakan pihak media maupun masyarakat melakukan investigasi secara terbuka terkait proyek-proyek PL di lingkungan pemerintah daerah.

"Silakan wartawan investigasi. Bisa saja ada kontraktor lain yang mendapatkan paket lebih banyak dari perusahaan saya. Yang jelas, kami bekerja sesuai aturan dan siap

mempertanggungjawabkan pekerjaan secara profesional," pungkasnya.

Kadis PUPR Kabupaten Belitung Oscar Yolanda, belum berhasil dihubungi upaya konfirmasi terkait transaksi bagi-bagi paket proyek PL ini. Namun Sekda Belitung Marzuki kepada Jayapos Rabu sore (20/05) secara tegas menyatakan kinerja OPD Dinas PUPR segera di evaluasi untuk menghindari keributan untuk diketahui semua pihak proyek PL disetiap OPD dilaksanakan melalui mekanisme. dan SOP system Unit layanan Terpadu (ULP dan LPSE). jang terjadi KKN semua kontraktor harus profesional dan perusahaannya tidak di Black List

Mantan anggota DPRD Belitung Johan Hanibal Palit mendukung sikap tegas bupati melalui Sekda melakukan evaluasi kinerja setiap OPD jika 3 bulan menjabat kepala OPD tidak memiliki kemam-

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Bupati Langkat H Syah Afandin SH, Asrendam I/BB Kolonel Arh Sugiri, Asintel Kasdam I/BB Kolonel Inf Endang Sumardi SSos, Asops Kasdam I/BB Kolonel Inf Eko Antoni Candra, Aslog Kasdam I/BB Kolonel Inf Jamet Nijo, Aster Kasdam I/BB Kolonel Inf Mochammad Fuad Suparlin, Kakesdam I/BB, Kabekangdam I/BB, Kazidam I/BB, Kapendam I/BB, Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Medwin Sangkakala SSos Mhan, Kasintel Korem 022/PT, Kasiter Korem 022/PT Letkol Arm Marjuq, Kasatpol PP Dameka Putra Singarimbun, unsur Forkopimda, perangkat Kecamatan Gebang dan Desa Pasarawa, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, rekan media cetak dan elektronik serta para peserta upacara. (RD)

..... Halaman 7

puan seharusnya diberikan sanksi seharus apa lagi menyangkut proyek APBD Kabupaten yang dananya uang rakyat Belitung.

Kita tunggu ketegasan bupati dan Sekda berani atau tidak menindak tegas kepala OPD. sudah bukan rahasia umum disinyalir adanya dugaan praktek KKN dan kedekatan dalam penunjukan proyek PL.

Komisi 2 DPRD Belitung diharapkan bersikap tegas bertindak dan merespon setiap pemberitaan media jika terbukti DPRD merekomendasikan agar kepala dinas yang tidak becus kinerjanya dan tidak mampu berinteraksi dengan PERS dicopot jabatannya digantikan kepada pejabat yang memiliki kemampuan menjadi pelayan rakyat bukan sebaliknya seorang kepala OPD dirinya merasa hebat dan merasa lebih hebat tandasnya.

(Yustami)

Jelang Idul Adha, Pemkab Simalungun Gelar GPM Halaman 7

pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Camat Bandar, Sumatera Utara, Kamis (21/05/2026), digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjangkau dan terpenuhi.

Antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam gelaran GPM ini mendapat perhatian penuh dari berbagai unsur pimpinan daerah. Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih hadir langsung di kegiatan ini. Kehadirannya tidak sendiri, Ny Darmawati didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun Ny Yulince Misnon Andreas Simamora, serta jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) Kabupaten Simalungun.

Hadir juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Simalungun Pardomuan Sijabat, Camat Bandar Supardi beserta jajaran, para pengurus TP PKK kabupaten, kecamatan hingga nagori/keurahan se-Kecamatan Bandar.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun Ny Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, GPM merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga.

"Gerakan Pangan Murah ini adalah bukti nyata kepedulian Pemkab Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bulog dan Bank In-

donesia untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Ny Darmawati berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sehingga dapat menjangkau nagori-nagori yang jauh dari pusat kota agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Melihat tingginya antusias masyarakat yang memadati halaman Kantor Camat Bandar, Ny Hj Darmawati mengimbau masyarakat agar tetap tertib selama kegiatan berlangsung serta memberikan prioritas kepada ibu lansia dan ibu hamil.

Dalam kesempatan itu, Ny Darmawati juga menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terkait ketersediaan stok bahan pangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pardomuan

Sijabat menyampaikan bahwa stok bahan pangan dalam kondisi aman dan apabila terjadi kekurangan, pihaknya siap melakukan koordinasi untuk penambahan pasokan.

Pardomuan menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di empat titik lokasi, yakni Kecamatan Tanah Jawa, Dolok Bandar, Bandar, dan Kecamatan Siantar.

Herman, salah seorang warga yang memanfaatkan kegiatan GPM ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih, atas pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah yang dinilai sangat membantu masyarakat.

"Program pasar murah ini sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bandar, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha," ungkap Herman.

(RD)

Kapolres AKBP Didik Kurnianto SIK Gelar Ramah Tamah Halaman 7

"Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami karena selama Polres Way Kanan ada, baru kali pertama Kapolres Way Kanan yang dipimpin oleh AKBP Didik Kurnianto mengunjungi kantor PWI

Way Kanan," ungkap Rico. Dalam sesi diskusi yang berlangsung santai, sejumlah isu strategis dibahas, seperti program lalulintas, olahraga, pengamanan serta berbagai program Polres Way Kanan

yang melibatkan masyarakat.

Kemudian, acara ditutup dengan do'a dan foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara Polres Way Kanan dan Insan Pers yang ada di PWI Way Kanan. Diharapkan, ke-

(Suhaili)

Bupati Sukabumi Hadiri Peringatan Hari Nelayan..... Halaman 7

sisir itu berlangsung meriah melalui arak-arakan budaya.

Arak-arakan budaya dimulai dari Pendopo Palabuhanratu menuju Alun-alun Gado-bangkong dipimpin Bupati Sukabumi H Asep Japar didampingi Wakil Bupati H Andreas, serta unsur Forkopimda. Hadir pula Staf Khusus (Stafus) Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian.

Bupati Sukabumi H Asep Japar mengatakan, festival budaya yang digelar setiap tahun menjadi bukti bahwa tradisi lokal mampu berkembang menjadi daya tarik wisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

"Dengan adanya upacara adat Hari Nelayan Nasional

ke-66 Palabuhanratu ini diharapkan dapat menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat laut, sekaligus membawa kesejahteraan, dan rezeki yang melimpah," ungkapnya.

Bupati pun mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian laut dari pencemaran, oguna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan serta menjaga hasil tangkapan ikan tetap melimpah bagi generasi penerus di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Stafus Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian menilai Hari Nelayan Nasional bukan sekadar seremoni budaya, melainkan bentuk rasa syukur

atas hasil laut yang diberikan Tuhan kepada masyarakat pesisir.

"Setiap nelayan yang mengarung lautan membawa doa dan harapan. Karena itu, menjaga kelestarian laut menjadi hal penting agar sumber penghidupan masyarakat tetap terjaga untuk generasi mendatang," ujarnya.

Ketua Panitia Hari Nelayan Nasional, Pepen Supendi menyebut peringatan tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang sarat nilai historis dan spiritual. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah

Kabupaten Sukabumi, aparat keamanan, sponsor, panitia, dan seluruh masyarakat Palabuhanratu yang telah menjaga kondusivitas acara," papar-nya.

Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi melalui Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Budaya Nandang Herawan, mendorong adanya kebijakan agar produk hasil tangkapan nelayan lokal dapat masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi.

"Langkah ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat," pungkasnya. (Yud)

MAN 1 Darussalam Ciamis Lakukan Studi Tiru.... Halaman 7

yang sarat akan esensi diskusi akademis.

Dalam sambutan penerimannya, Kepala MAN 4 Jakarta Selatan Widyo Prayoga MPd menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan kerja ini. Widyo memaparkan gambaran umum mengenai manajemen kurikulum, integrasi teknologi dalam pembelajaran, serta strategi pengelolaan program-program unggulan nasional dan internasional yang selama ini menjadi pilar prestasi di MAN 4 Jakarta Selatan.

"Kami sangat terbuka untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Sinergi antar-madrasah seperti ini sangat penting agar kita dapat maju bersama dalam mencetak generasi emas yang kompetitif," ujar Widyo Prayoga.

Sementara itu, Kepala MAN 1 Darussalam Ciamis H Dayat SPd MSi, menyampaikan rasa terima kasih dan

penghormatan atas penyambutan yang luar biasa dari pihak tuan rumah. H Dayat menjelaskan bahwa pemilihan MAN 4 Jakarta Selatan sebagai lokus studi komparatif didasarkan pada reputasi madrasah tersebut yang telah terbukti unggul dalam melahirkan inovasi program dan prestasi di tingkat nasional.

Terkait hasil akhir dari kunjungan kerja ini, H Dayat sangat berharap bagi masa depan dan arah perkembangan mutu, program unggulan serta tata kelola di lingkungan MAN 1 Darussalam Ciamis yang lebih baik.

"Kami berharap melalui studi tiru ini, sebagian jajaran tim manajemen MAN 1 Darussalam Ciamis mampu menyerap, mengadopsi, sekaligus memodifikasi sistem pengelolaan program unggulan yang berjalan sukses di MAN 4 Jakarta Selatan. Semoga poin-poin strategis yang didapatkan hari

ini tidak sekadar menjadi catatan, melainkan dapat segera diimplementasikan secara nyata demi meningkatkan mutu madrasah kita, sehingga MAN 1 Darussalam Ciamis semakin inovatif, unggul, dan siap menjawab tantangan zaman," tegasnya.

Setelah sesi pemaparan materi kegiatan studi komparatif ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antar pimpinan yang didampingi oleh para pengelola program.

Usai sesi formal dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata sebagai simbol jalinan silaturahmi. Rombongan MAN 1 Darussalam Ciamis juga berkesempatan melakukan observasi lapangan dan meninjau langsung berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, laboratorium, pusat sumber belajar, tempat olahraga terpadu serta fasilitas penunjang lainnya. (Mamay)

Wakil Bupati Katamso Buka Rapat Timpora Halaman 7

Wakil Bupati Katamso menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap kondusif.

"Seiring dengan kemajuan pembangunan daerah serta letak geografis Tanjung Jabung Barat yang strategis, peluang masuknya warga negara asing ke daerah ini tentu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, di satu sisi kita tetap menerapkan selective policy atau kebijakan selektif, di mana kita terbuka terhadap kehadiran warga negara asing yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wakil Bupati.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing harus tetap dilakukan secara optimal, terukur, dan terpadu agar tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan dua agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam forum Timpora.

Wakil Bupati Katamso menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap kondusif.

"Seiring dengan kemajuan pembangunan daerah serta letak geografis Tanjung Jabung Barat yang strategis, peluang masuknya warga negara asing ke daerah ini tentu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, di satu sisi kita tetap menerapkan selective policy atau kebijakan selektif, di mana kita terbuka terhadap kehadiran warga negara asing yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wakil Bupati.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing harus tetap dilakukan secara optimal, terukur, dan terpadu agar tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan dua agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam forum Timpora. Melalui forum Timpora ini, saya ingin menegaskan dua agenda utama yang harus kita selesaikan bersama, yakni penguatan sinergitas antarinstitusi dengan menghilangkan ego sektoral, serta optimalisasi desa binaan imigrasi dan peran PIMPAS atau Petugas Imigrasi Pembina Desa," tambahnya.

Menurutnya, kolaborasi yang solid antarinstansi sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika pengawasan keimigrasian yang semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan investasi, mobilitas penduduk, dan arus globalisasi yang terus meningkat.

Melalui kegiatan optimalisasi pengawasan keimigrasian ini, diharapkan seluruh unsur Timpora dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan, pertukaran informasi, serta penanganan berbagai persoalan keimigrasian secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan.

Adapun Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari unsur lintas instan-

si, yakni Kapolres, Dandim 0419/Tanjab, Kajari, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala DPMPSTP, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pariwisata, Kasat Polairud, perwakilan BIN, serta Komandan Pos TNI AL.

Sementara itu, Sekretaris Timpora dijabat oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Ketua Timpora adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, dengan penasihat Bupati Tanjung Jabung Barat dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Tanjabbar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi atau yang mewakili, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kualatungkal, para kepala instansi terkait, perwakilan BIN Kabupaten Tanjabbar, serta anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian keberadaan orang asing di wilayah Kabupaten Tanjabbar. (Tenk/Kominfo- Tjbb)

Penanguhan Penyerahan SPT Korwil Halaman 7

Sekolah (K3S), hingga K2S yang telah tersebar di tiap kecamatan.

Publik menilai Dinas Pendidikan seharusnya lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan di Garut, seperti kekurangan guru, kepala sekolah, dan pengawasan pendidikan. Pengaktifan kembali 42 Korwil justru dianggap berpotensi menambah polemik baru di tengah kebutuhan pembenahan sektor pendidikan yang lebih mendasar.

Selain itu, isu dugaan adanya setoran uang sebesar Rp25 juta per orang bagi calon Korwil yang sempat mencuat di sejumlah media online juga menjadi perhatian publik. Masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Asep Wawan, menjelaskan bahwa agenda tersebut sejatinya merupakan pembinaan kepada para calon Korwil dan belum sampai pada tahap penyerahan resmi SPT.

Menurutnya, pengaktifan kembali Korwil dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi internal setelah sebelumnya para Korwil sempat dibebastugaskan oleh Bupati Garut, Abdusy Syukur Amin.

"Wilayah Garut sangat luas, sehingga diperlukan pengendalian dan percepatan informasi di lapangan agar kepala sekolah dan jajaran pendidikan dapat memperoleh pembinaan secara cepat," ujarnya kepada wartawan.

Ia menambahkan, pengaktifan Korwil mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2018. SPT, kata dia, dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan harus mendapatkan persetujuan Bupati Garut.

Sementara itu, salah seorang calon Korwil dari Kecamatan Cikelet, Abdul Manaf, mengaku kecewa atas penanguhan tersebut. Ia menilai

para calon Korwil telah meluangkan waktu dan menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri agenda penyerahan SPT, namun yang diterima justru penundaan tanpa kepastian.

"Kami datang untuk menerima SPT, tetapi yang terjadi justru penanguhan. Kami berharap ada penjelasan langsung dari Bupati," ujarnya.

Ia juga meminta Bupati Garut turun langsung ke lapangan apabila ingin menindaklanjuti isu dugaan permainan uang yang beredar di masyarakat, sehingga persoalan tersebut dapat dibuktikan secara objektif dan tidak sekadar berdasarkan asumsi.

Menurut Abdul Manaf, para calon Korwil berharap pemerintah daerah dapat memberikan kepastian dan memperlakukan mereka secara profesional serta manusiawi dalam proses penataan birokrasi di lingkungan pendidikan Kabupaten Garut.

(Hartono)

Sengketa Pengelolaan UNBARI Belum Tuntas Meski Inkracht, YPBJ Mohon Perlindungan Hukum dan Eksekusi ke Presiden



Universitas Batanghari Jambi (foto/Ist)

Jambi, Jaya Pos

Sengketa pengelolaan Universitas Batanghari kembali mencuat setelah pihak Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi (YPBJ) mengajukan permohonan perlindungan hukum dan percepatan pelaksanaan eksekusi kepada Presiden Republik Indonesia.

Permohonan tersebut disampaikan menyusul belum terlaksananya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait pengelolaan Universitas Batanghari (UNBARI), meski Mahkamah Agung RI telah memenangkan pihak YPBJ sebagai pengelola sah perguruan tinggi tersebut.

Ketua YPBJ, Drs. H. Husin Syukur, menyampaikan bahwa pihak yayasan berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius demi menjamin kepastian hukum dan menyelamatkan masa depan pendidikan tinggi di Provinsi Jambi.

“Putusan pengadilan su-

dah inkracht, namun hingga kini pelaksanaan eksekusi masih mengalami hambatan di lapangan. Kondisi ini berdampak serius terhadap keberlangsungan akademik dan kepercayaan masyarakat,” ujar Husin Syukur dalam keterangannya.

Menurut pihak yayasan, konflik berkepanjangan tersebut telah menyebabkan penurunan drastis jumlah mahasiswa di UNBARI. Jika sebelumnya kampus itu memiliki sekitar 7.000 mahasiswa, kini jumlahnya disebut tersisa sekitar 1.500 mahasiswa. Kondisi itu dinilai menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Putusan MA Tegaskan YPBJ Sebagai Pengelola Sah Dalam kronologi perkara yang disampaikan YPBJ, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 6456 K/Pdt/2024 menolak permohonan kasasi pihak lawan dan

kementerian terkait. Dengan putusan tersebut, MA menguatkan putusan sebelumnya yang menyatakan YPBJ sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi yang sah untuk mengelola UNBARI.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor 56/PDT/2024/PT JMB juga telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jambi dalam amar putusannya menyatakan bahwa YPBJ berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 28 September 2022 merupakan badan penyelenggara pendidikan tinggi UNBARI yang sah. Pengadilan juga menyatakan tindakan pihak lawan yang mengelola serta menjaminkan aset universitas sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Eksekusi Dinilai Mandek

Meski putusan telah inkracht, proses eksekusi disebut

masih mengalami hambatan administratif dan teknis. Berdasarkan Surat Nomor 396/PAN.01.W5-U1/HK2.4/II/2025, perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

YPBJ menyebut permohonan eksekusi telah diajukan melalui Nomor 1/Pen.Aan/Pdt.Eks/2024/PN Jmb dan proses aanmaning atau peringatan telah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni pada 18 Maret, 16 April, dan 30 April 2025.

Namun demikian, proses tersebut disebut belum membuahkan hasil karena adanya kendala dalam pembentukan panitia juri sista eksekutif serta ketidakhadiran pihak kementerian terkait dalam proses aanmaning. Situasi itu dinilai memperlambat penyerahan aset dan pengelolaan kampus secara sukarela sehingga diperlukan langkah eksekusi paksa oleh pengadilan.

Gugatan PTUN Dinilai Upaya Mengulur Waktu Di sisi lain, pihak lawan

saat ini diketahui mengajukan gugatan administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Gugatan tersebut bertujuan membatalkan legalitas pengesahan YPBJ. Namun, YPBJ menilai langkah tersebut hanya merupakan upaya mengulur waktu atau buying time, karena pokok sengketa mengenai hak pengelolaan universitas telah diputus secara perdata oleh Mahkamah Agung.

Atas dasar itu, YPBJ meminta Presiden RI memberikan atensi kepada kementerian terkait agar menghormati putusan Mahkamah Agung, mendorong percepatan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jambi, serta memastikan perlindungan hukum terhadap upaya administratif yang dinilai bertujuan menganulir putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

(RED)

2170 KK di Desa Sukawali Terima Bantuan Beras dan Migor

Tangerang, Jaya Pos

Sebanyak 2.170 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sukawali Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, menerima bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng (migor) dari pemerintah. Bantuan tersebut disalurkan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa Sukawali Suparman, mengatakan peny-

luran bantuan berjalan lancar dan mendapat sambutan baik dari warga. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

“Bantuan ini sangat membantu warga, khususnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Kami berharap program seperti ini terus berlanjut agar masyarakat kecil benar-benar merasakan kehadiran pemer-

intah,” ujar Suparman. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Desa Sukawali.

“Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan perhatian kepada warga kami. Semoga bantuan ini bermanfaat dan bisa meringankan beban masyarakat,” tambahnya. (Abd)



Suparman Kades Sukawali kecamatan Pakuhaji Tangerang Banten. (foto: abd)

Jelang Idul Adha 1447 H DKP3 Pasuruan Pastikan Setiap Hewan Miliki SKKH



Hewan qurban Pasuruan. (foto:ist)

Pasuruan, Jaya Pos

Menjelang Idul Adha 1447 H, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasuruan sarankan saat mencari hewan kurban di luar pasar resmi pastikan untuk setiap hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) untuk menjamin hewan bebas dari penyakit.

Kadis DKP3, Ainur Alfiah mengatakan saat membeli hewan diluar pasar pastikan pembeli memeriksa langsung kondisi fisik hewan seperti mata cerah, lincah, tidak cacat, dan cukup umur.

“Kebanyakan peternak saat ini sudah memberikan fasilitas penitipan gratis hingga hari pemotongan dan layanan pengiriman ke alamat,” ucap Ainur Alfiah Kadis DKP3, Kamis (21/5/2026).

Selain itu ia juga menyarankan untuk survei langsung ke kandang guna melihat kondisi fisik dan kebersihan tempat penampungan hewan tersebut.

Nampak seorang peternak hewan kurban Sami'an warga Sekar Putih, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa dirinya sebagai peternak hewan kurban juga mengecek setiap hewannya seperti sapi dari mata, hidung, serta tidak sakit memastikan hewan kurban yang ia miliki sehat siap untuk dijual.

“Apalagi harus memiliki Surat Keterangan kesehatan hewan dari dinas peternakan. Setiap yang titip hewan ke kandang saya, selalu saya cek kesehatannya hewan itu sakit apa tidak, baru saya terima hewan tersebut,” ujarnya. (Wio)

Undang Elemen Publik FKP Polres Trenggalek Jadi Sarana Tingkatkan Kualitas Layanan



Penandatanganan MoU dalam gelaran FKP di aula Rumatama Mapolres Trenggalek, Selasa (19/5/2026). (foto:ist)

Trenggalek, Jaya Pos

Dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, gelaran Forum Konsultasi Publik (FKP) Polres Trenggalek jadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal tersebut dilakukan oleh jajaran Polri di wilayah Bumi Menak Sopal agar kualitas fasilitasi publik benar-benar optimal.

Untuk itulah, dalam kegiatan ini tidak hanya melibatkan personel dari satuan fungsi internal, namun juga menghadirkan berbagai unsur, baik dari kalangan akademisi, awak media hingga tokoh muda dan pengusaha.

Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki saat membuka acara menyampaikan jika pada prinsipnya seluruh kegiatan kepolisian merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa satuan kerja yang secara lebih spesifik memang memiliki unit pelayanan bersifat administratif. Seperti pada SPKT, SKCK, Satpas SIM, Regident, pelayanan Satreskrim, Tahti dan yang kini sedang digencarkan adalah ‘call center 110’.

“Saat sekarang, benar-benar diupayakan agar layanan 110 bisa dikenal luas oleh publik. Itu dimaksudkan untuk memberikan respon cepat terhadap segala laporan dan aduan masyarakat. Sekaligus sebagai layanan darurat yang membutuhkan bantuan kepolisian,” sebutnya, di Aula Rumatama Mapolres Trenggalek, Selasa (19/05/2026).

Dikatakan oleh AKBP Ridwan bahwa selama 3 tahun berturut-turut pihaknya telah mendapatkan pengakuan dengan predikat pelayanan prima. Itu merupakan bentuk implementasi komitmen dan konsistensi jajaran Polres Trenggalek dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Demi mewujudkannya, lanjut dia, kepada masing-masing satuan kerja yang membidangi pelayanan publik akan memaparkan terkait bidang tugas. Baik tentang mekanisme kerja, berikut regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan serta hak dan kewajiban dari aspek petugas maupun masyarakat.

Sementara itu, salah satu akademisi yang juga merupakan dosen STKIP Trenggalek Wawan Prasetyo menyampaikan pujian atas kemudahan dan fasilitas layanan pada beberapa fungsi di Polres Trenggalek yang dinilai cukup memadai.

Dari waktu ke waktu, pelayanan sudah semakin baik sehingga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. “Harapan saya, kualitas pelayanan yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi ke depannya,” ungkap Wawan. Pun begitu, akademisi ini juga sempat menyoroti maraknya penggunaan knalpot ‘brong’ (bising) karena dinilai sangat mengganggu. Kemudian, masih sering terjadi pelanggaran oleh pengguna jalan di seputar ‘traffict light’ sehingga menjadi sumber keresahan di tengah masyarakat.

Senada, perwakilan wartawan, Heru Wijaya juga memberikan apresiasi atas ketersediaan fasilitasi bagi warga berkebutuhan khusus yang cukup lengkap. Mulai dari jalur khusus, toilet bagi difabel hingga papan petunjuk braille sehingga benar-benar membantu. (HWI)

Pemkot Banjar Berkomitmen Menjadi Pionir Keselamatan Perlindungan Anak di Lingkungan Ponpes

Banjar, Jaya Pos

Kota Banjar berkomitmen menjadi pionir keselamatan perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Di tengah ramainya berita miring mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar bersama elemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar menandatangani Komitmen Kota Banjar menjadi wilayah yang aman bagi anak-anak di lingkungan ponpes.

Wakil Wali Kota Banjar H Supriana, didampingi

Forkopimda Kota Banjar, Kepala Dinas Sosial menghadiri Workshop Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak di lingkungan Ponpes Kota Banjar, bertempat di Pesantren Modern Daarul Istiqomah, Desa Binangun Kecamatan Pataraman, beberapa waktu lalu.

Dihadiri Forum Pondok Pesantren Kota Banjar, Perlindungan Anak dan Perempuan di lingkungan Pesantren Kota Banjar menjadi fokus penting bagi pemkot melalui arahan dan diskusi yang persuasif dan inklusif antar seluruh elemen dan penda-



Wakil Wali Kota Banjar H Supriana hadir Workshop Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak di lingkungan ponpes. (Foto:Mamay)

tanganan komitmen bersama menjadikan kegiatan ini

memiliki nilai tanggung jawab lebih dalam menjadikan kota

banjar ramah anak dan terhindar dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama, khususnya pesantren.

“Saya gecekan keras apa yang terjadi di luar sana terkait kekerasan seksual di lingkungan ponpes. Pendidikan keagamaan pesantren itu ibarat selembar kertas putih jika dinodai oleh satu titik maka dampaknya akan terasa ke seluruh kertas. Komitmen antar semua elemen wajib kita lakukan demi menjadikan Kota Banjar yang agamis sesuai visi Masa-gi, yang terhindar dari hal hal tidak senonoh seperti di Kota,” pungkasnya. (Mamay)